

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan /pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

2. Kedudukan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Kpts/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama Luar Negeri merupakan salah satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen kerja sama luar negeri di bidang Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
5. Pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Bagian Bilateral
- (2) Bagian Regional
- (3) Bagian Multilateral
- (4) Bagian Pengelolaan dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian;

Bagian Bilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik;
2. Sub Bidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
3. Sub Bidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Regional memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan ASEAN;
2. Sub Bagian Non-ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Non-ASEAN;
3. Sub Bagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Intra Kawasan.

Bagian Multilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan;
2. Sub Bagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;

3. Sub Bagian Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri dibidang pertanian;
2. Sub Bagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian;
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tinggal Biro Kerja Sama Luar Negeri

3. Visi dan Misi

Visi Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

Misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif.
2. Menyusun rumusan kebijakan kerja sama luar negeriyang mendukung Strategi Induk pembangunan pertanian nasional.
3. Menyusun program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
4. Meningkatkan peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Mendiseminasikan hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Memantau dan mengevaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Melaksanakan fungsi pelayanan organisasi yang prima.

2. Tujuan

Tujuan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri periode tahun 2015 -2019, sebagai berikut :

1. Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian.
2. Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerja sama dibidang pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.
4. Meningkatkan kerjasama bidang pertanian melalui pertemuan / sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral.
5. Menggali dan memanfaatkan peluang kerja sama melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk peningkatan kerja sama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama teknik maupun kerja sama perdagangan dan investasi sektor pertanian.
6. Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi.

3. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif .

2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Strategi Induk* pembangunan pertanian.
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
4. Terwujudnya peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri selama Bulan Mei 2016, dapat dilaporkan sebagai berikut :

2.1. BAGIAN BILATERAL

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Kunjungan Tim Penyusunan Grand Design Kerjasama Pertanian di Negara Mitra di wilayah Afrika tanggal 25-28 April 2016 di Negeria
2. Persiapan menyaksikan penandatanganan Agreement on Agriculture IETO – TETO dan pelaksanaan pertemuan konsultasi pertama IETO – TETO tanggal 29-30 April 2016 di Taipei Taiwan.
3. Penandatanganan Agreement on Agriculture IETO – TETO dan pelaksanaan pertemuan konsultasi pertama IETO – TETO, tanggal 11-14 Mei 2016 di Taipei-Taiwan
4. Mendampingi Tim Survey dari JICA dalam pengumpulan data terkait dengan Public-Private-Partnership for Activating Agricultural Promotion, tanggal 17-28 Mei 2016 di NTB, Jawa Barat, Sulut, NAD, Sumut, Sumbar, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung
5. Pelaksanaan Workshop Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra Kawasan Afrika, tanggal 20-21 Mei 2016 di Yogyakarta
6. Kunjungan kerja Delegasi Kementerian Pertanian RI ke Hongaria tanggal 23-28 Mei 2016 di Hongaria

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Bilateral

1. Rapat Koordinasi Kerja Sama Internasional dengan Perwakilan Negara Mitra di Jakarta tanggal 25-26 April 2016 di Bogor
2. Koordinasi Penjajakan Kerja Sama dengan Provinsi NTT, tanggal 28-30 April 2016 di Nusa Tenggara Timur

3. Rapat Perundingan ke – 3 Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA - CEPA), tanggal 2-4 Mei 2016 di Yogyakarta
4. Koordinasi Penjajakan Kerja Sama dengan Provinsi Sulut.tanggal 9-11 Mei 2016 di Manado
5. Rapat Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Bidang Pertanian tanggal 16 Mei 2016 di Bogor
6. Pertemuan *Review* Capaian Kerja Sama Bilateral Bidang Pertanian, tanggal 27 Mei 2016 di Bogor

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri rapat Peserta Aktif pada pertemuan Koordinasi dan Dialog ‘Penguatan Hubungan Ekonomi RI-Afrika, termasuk Afrika Selatan dan Zimbabwe, tanggal 12 April 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
2. Menghadiri Pembekalan Potensi Pertanian Bagi Para Diplomat RI yang akan ditempatkan di Beberapa Negara Mitra tanggal 9-13 Mei 2016 di Jawa Tengah

2.2. BAGIAN REGIONAL

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pertemuan *The 4th Meeting Of ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council* 5-6 Mei 2016 Di Siem Reap, Kamboja
2. Sidang Komisi ESCAP – Senior Official Segment (SOS), tanggal 15 Mei 2016 di UNCC
3. Sidang 32nd Follow-Up Committee COMCEC. Tanggal 17-18 Mei 2015 di Turki Ankara

4. Menghadiri pertemuan The 19th Meeting of the National Focal Point for the ASEAN Cocoa Club (ACC) on ASEAN Cooperation and Joint Approaches in Agriculture and Forestry Products Promotion Scheme, tanggal 18-20 Mei 2016 di Yogyakarta
5. Sosialisasi Kerjasama ASEAN Bidang Pertanian 2016-2025, tanggal 27 Mei 2016 di Mataram

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Regional

1. Pendampingan Wawancara dari IISD terkait kerjasama IMT-GT, tanggal 30 Mei 2016 di Biro KLN

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Rapat Pertemuan Tindak Lanjut RCEP WGTIG 12 dan Penyusunan Non-Paper Indonesia tanggal 9 Mei 2016 di Bogor
2. Rapat Koordinasi Penajaman BIMP-EAGA Vision (BEV 2025), tanggal 16 Mei 2016
3. Koordinasi Kerjasama IMT-GT, tanggal 24-25 Mei 2016 di Palembang Sumatera Selatan
4. Rapat Persiapan Pertemuan 13th RCEP-TNC *and Related Meetings* di Auckland, Selandia Baru tanggal 25 Mei 2016 di Hotel Double Tree Jakarta

2.3. BAGIAN MULTILATERAL

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Seminar “Peran Penting Pertanian dalam Kerjasama Multilateral, tanggal 19 Mei 2016 di Batam
2. The 5th Meeting of Agricultural Chief Scientist, tanggal tanggal 30-31 Mei 2016 di RRT

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Multilateral

1. Koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan GIAHS-FAO tanggal 2-4 Mei 2016 di Majalengka Jawa Barat
2. Rapat penyempurnaan *draft* kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kemtan) dengan IDH *International Trade Initiative*, tanggal 9 Mei 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
3. Rapat persiapan *Diplomatic Tour* HPS ke-36 tahun 2016, tanggal 11 Mei 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
4. Koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan GIAHS-FAO, tanggal 12-14 di Tasikmalaya Jawa Barat
5. Rapat persiapan sidang FAO Council ke-154, tanggal 12 Mei 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
6. Rapat persiapan FAO Council ke-154, tanggal 25-26 Mei 2016 di Hotel Royal Padjajaran Bogor

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri rapat Koordinasi dalam rangka Menindaklanjuti Permintaan *Country Visit Special Procedure Mandate Holder* (SPMH) PBB, tanggal 10 Mei 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
2. Menghadiri Bimbingan Teknis Diplomasi dan Negosiasi Bidang Ketahanan Pangan, tanggal 11-13 Mei 2016 di Bandung
3. Menghadiri Rapat koordinasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam hal Fasilitasi Kemitraan Ormas yang didirikan Warga negara Asing, tanggal 12 Mei 2016 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta

2.4. BAGIAN PENGELOLAAN PHLN DAN ATANI

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Koordinasi kegiatan kerja sama luar negeri tanggal 19-21 Mei 2016 di Kabupaten Cianjur
2. Pemanfaatan Peluang Kerjasama Luar Negeri di Bidang Pertanian, tanggal 24-26 Mei 2016 di Balikpapan
3. Menghadiri Sosialisasi Kepegawaian (e-personal), tanggal 23 Mei 2016 di Bogor
4. Menghadiri Rapat Kerja PPID, tanggal 26 Mei 2016 di Bogor
5. Menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Terkait Pengelolaan Hibah, tanggal 26 Mei 2016 di Batam

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 163 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 13 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 59 orang, melakukan kunjungan kerja sebanyak 26 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 63 orang, program S2 sebanyak 1 orang dan program S3 sebanyak 1 orang

2.5. ATASE PERTANIAN WASHINGTON DC

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Kunjungan Wapres RI menghadiri NSS di Washington DC, tanggal 1-3 April 2016
2. Pertemuan Informal dengan American Chamber dan US Chamber of Commerce di Wisma Indonesia, tanggal 6 April 2016

3. Rapat koordinasi kegiatan bulanan di KBRI, tanggal 7 April 2016
4. Pertemuan dengan Governer's Commiss on Asian Pacific America Affairs and US Asialinks di KBRI tanggal 7 April 2016
5. The 28th SCAA di Atlanta, Georgia, tanggal 14-17 April 2016
6. Rapat persiapan Wonderful Indonesia dan Passport DC, tanggal 26 April 2016
7. Rapat persiapan pertemuan dengan Council on Foreign Relations di KBRI, tanggal 26 April 2016
8. Pertemuan dengan Council on Foreign Relations di Wisma, tanggal 27 April 2016
9. Wonderful Indonesia Festival di New Orleans, tanggal 29-30 April 2016
10. Committee Meeting- Forest Carbon Partnersip Facility (FCPF) di World Bank WDC, tanggal 2 Mei 2016
11. Rapat koordinasi kegiatan bulanan di KBRI, tanggal 3 Mei 2016
12. Rapat finalisasi persi apan Passport DC di KBRI, tanggal 3 Mei 2016
- 13, Passport DC di KBRI, tanggal 7 Mei 2016
14. Pertemuan dengan RARE Indonesia di KBRI, tanggal 9 Mei 2016
15. Sosialisasi Perkem-bangan Terkini Infra-struktur Transportasi & Peluang Investasi di Indonesia, tanggal 13 Mei 2016
16. Mendampingi DELRI Kemendag bertemu NFI di KBRI, tanggal 17 Mei 2016
17. Pertemuan dengan Tim IPB di KBRI, tanggal 17 Mei 2016
18. Mendampingi DELRI Kemendag bertemu NOAA dan USTR di USTR, tanggal 18 Mei 2016

19. Pertemuan dengan Health in Harmony di KBRI, tanggal 19 Mei 2016
20. Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di KBRI, tanggal 20 Mei 2016
21. Pertemuan dengan Kepala BKPM dan Tim di Wisma, tanggal 22 Mei 2016
22. Pertemuan dengan Acha Production di KBRI, tanggal 23 Mei 2016
23. TPP dengan Mahasiswa Georgetown Univ, tanggal 24 Mei 2016
24. Menghadiri *The 93rd Regular Session of the International Cocoa Council (ICCO)* di Bavaro, Republik Dominika, tanggal 25 – 29 Mei 2016
25. Rapat koordinasi kegiatan bulan Juni, tanggal 31 Mei 2016

LAPORAN BULANAN BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

PERIODE BULAN MEI 2016

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT	KEGIATAN	PIHAL YANG TERLIBAT	HASIL KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
BAGIAN BILATERAL					
1.	12 April 2016, Kementerian Luar Negeri, Ruang Sunda Kelapa	Rapat Peserta Aktif pada pertemuan Koordinasi dan Dialog 'Penguatan Hubungan Ekonomi RI-Afrika, termasuk Afrika Selatan dan Zimbabwe	Kementan, Kemendag KADIN RI, Direktur Bisnis Korporasi BNI, Direktur Bisnis Korporasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acara ini didorong oleh temuan-temuan permasalahan perdagangan RI-Afrika selama kunjungan kerja Wamenlu ke Afsel dan Zimbabwe 8-11 Februari 2016 2. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Aturan di masing-masing Negara tujuan ekspor dan permasalahan ketakutan untuk mencoba. 3. Mendorong pembentukan persetujuan perdagangan bilateral RI dengan Negara tertentu maupun PTA dengan organisasi sub-kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementan RI dapat mempertimbangkan penanggungan pemberlakuan <i>food safety system</i> kepada Ethiopia, mengingat ketentuan ini baru diketahui pihak Ethiopia. 2. Menyampaikan database perusahaan/eksportir furniture RI yang bonafid kepada perusahaan Afsel
2.	25 - 28 April 2016 Nigeria	Kunjungan Tim Penyusunan Grand Design Kerjasama Pertanian di Negara Mitra di wilayah Afrika	Biro KLN dan KBRI Abuja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Tim Kajian Grand Design Pilot Project Pertanian Dengan Negara Mitra di Wilayah Afrika Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI diwakili oleh Kepala Sub Bagian Afrika dan Timur Tengah didampingi oleh P.F. Pensosbud KBRI Abuja pada tanggal 25 - 28 April 2016 telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pemangku kebijakan disektor pertanian serta para pelaku usaha tani dan organisasi yang sangat concern dalam pembangunan pertanian di Nigeria. 2. Tujuan kunjungan dimaksud adalah untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktifitas Pilot Project akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi menyentuh seluruh aspek pada rantai pasok komoditas pertanian, mulai dari hulu (up-stream) hingga hilir (down-stream). 2. Terkait usulan pelatihan yang diajukan, KBRI Abuja menyarankan agar hal tersebut dapat disampaikan melalui prosedur yang berlaku melalui

				<p>memperoleh data dan informasi secara langsung yang nantinya akan dianalisa dan dimanfaatkan sebagai panduan dalam penyusunan program bantuan pertanian berupa Pilot Project yang nantinya memiliki dampak strategis dalam peningkatan kerjasama pertanian bagi kedua negara.</p> <p>A. PERTEMUAN DENGAN FEDERAL MINISTRY AND RURAL DEVELOPMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada pertemuan dengan Federal Ministry of Agriculture and Rural Development yang diwakili oleh beberapa Deputy Director of Planning disampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Nigeria saat ini menekankan pada transformasi ekonomi pedesaan melalui sebuah program LIFE (Labour Incentive Farming Enterprise) yang diharapkan akan mendorong ekonomi dan meningkatkan pendapatan diwilayah pedesaan yang selama ini belum tersentuh. • Disampaikan pula bahwa Pemerintah memiliki perhatian yang sangat serius dalam upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam pengembangan processing dan post harvest handling khususnya untuk beberapa komoditas seperti palm oil, palm kernel, cocoa, cashew, sesame, Gum Arabic, fruits, dan vegetables Minyak sawit, inti sawit, kakao, jambu mede, wijen, buah-buahan dan sayuran. • Peningkatan kapasitas dan kemampuan petani yang diharapkan dapat menjadikan pertanian sebagai ladang bisnis dari tahun ke tahun diperlukan untuk menjadikan para petani mandiri sehingga dapat menghasilkan komoditas produk pengganti 	<p>Ministry of Agriculture and Rural Development yang kemudian akan ditindaklanjuti ke Pusat untuk dimintakan arahan lebih lanjut dan diharapkan dapat langsung ditujukan kepada para petani dan petugas lapangan sebagai pelaku kegiatan bukan hanya sebatas petugas Kementerian yang dampaknya kurang dapat dirasakan para petani.</p> <p>3. Merumuskan rancangan pengembangan Pilot Project berdasarkan hasil identifikasi yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat terhadap kondisi existing pertanian Nigeria dan harus memiliki target sasaran yang jelas, dan secara bertahap harus mampu menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat setempat.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>import seperti beras, gula, gandum, susu, produk olahan tomat dan sari pati buah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada pertemuan disampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk membantu peningkatan produksi pertanian diantaranya melalui pelaksanaan Pilot Project komoditas unggulan dan program pengembangan kapasitas. Selain itu mengingat telah adanya payung hukum kerjasama pertanian kedua negara, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama. <p>B. PERTEMUAN DENGAN AFRICAN UNION (AU) DAN NIGERIA-INDONESIA COMMERCIAL ASSOCIATION (NICA)</p> <p>Pertemuan dengan kedua organisasi tersebut lebih menekankan pada adanya kebutuhan program pengembangan kapasitas berupa training atau study tour bagi para petani. Kedua organisasi tersebut telah mempersiapkan proposal dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berharap agar Pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi dengan mempersiapkan sebuah program pelatihan sesuai yang dibutuhkan petani Nigeria</p> <p>C. PERTEMUAN DENGAN KELOMPOK TANI ABUJA GREEN COOPERATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka pengisian questioner sebagai pendukung data penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian Dengan Negara Mitra, Tim Kajian didampingi P.F.Pensosbud KBRI Abuja berkunjung salah satu kelompok tani "Abuja Green 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Cooperative Society Limited” yang berlokasi di Angwamada Asakoro Abuja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pertemuan dengan 12 orang petani yang memiliki lahan pertanian yang dikelola seluas 48,76 Ha didampingi dengan Ketua Koperasi diperoleh informasi bahwa sampai saat ini para petani memiliki lahan yang diperuntukkan untuk ternak unggas/ayam, jagung, jahe, wijen, tomat, jagung, kedelai dan lele. • Panjangnya musim kemarau menghambat pertumbuhan komoditas tersebut selain sistem irigasi yang masih bersifat tradisional serta tidak adanya pengedukasian mengenai sistem mekanisasi pertanian. Namun demikian hampir setiap petani menerapkan sistem pertanian terintegrasi yang menandakan bahwa mereka telah memiliki pondasi ilmu yang cukup dalam mengelola lahan pertanian. • Dari kunjungan lapangan yang dilakukan dapat diketahui bahwa permasalahan utama selain mekanisasi adalah minimnya pengetahuan prosesing dan pengolahan pasca panen sehingga para petani Nigeria sangat mengharapkan adanya program pelatihan oleh Pemerintah Indonesia dan sangat menyambut baik sekiranya Pilot Project Indonesia dapat segera direalisasikan di Nigeria. 	
3.	25-26 April 2016 Hotel Salak Bogor	Koordinasi Kerja Sama Internasional dengan Perwakilan Negara Mitra di Jakarta	Seluruh Perwakilan Negara Mitra (Kedutaan) di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB; Biro KLN, Kementan RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi diplomatik antara Kementerian Pertanian RI dengan perwakilan negara mitra di Indonesia untuk peningkatan kerja sama sektor pertanian; 2. Paparan dan sinkronisasi kebijakan pertanian Indonesia dengan negara mitra di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa protes dari perwakilan dengan mitra kepada kebijakan pertanian Indonesia, seperti penerapan beberapa Permentan untuk bidang peternakan, hortikultura dan Tanaman Pangan telah

					<p>dijelaskan lebih komprehensif sehingga memberikan pemahaman yang baik bagi peserta yang hadir;</p> <p>2. Biro KLN menyampaikan tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator untuk meningkatkan kerja sama Kementerian Pertanian dengan beberapa negara mitra.</p>
4.	28-30 April 2016 Provinsi NTT	Koordinasi Penjajakan Kerja Sama dengan Provinsi NTT	Biro KLN, Kemtan, Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi pertanian yang ada di Provinsi NTT untuk dapat dikerjasamakan dengan pihak Argentina; 2. Potensi pertanian di Provinsi Sulawesi Utara yaitu investasi untuk pengembangan ternak sapi, ternak babi, kambing dan ayam potong di Sulawesi Utara. 3. Permasalahan ketersediaan pakan hijauan di Provinsi NTT yang sangat sulit dikarenakan curah hujan sedikit, mengakibatkan ketersediaan pakan dan nutrisi bagi ternak menjadi permasalahan yang sangat krusial; 	Perlu ditindaklanjuti kerja sama bidang penelitian pakan hijauan dengan pihak Argentina sebagai sumber protein dan nutrisi utama bagi ternak.
5.	29 – 30 April 2016 Taipei, Taiwan	Persiapan menyaksikan penandatanganan Agreement on Agriculture IETO – TETO dan pelaksanaan pertemuan konsultasi pertama IETO – TETO	Biro KLN, KDEI, Council of Agriculture, Taiwan, Ministry of Foreign Affairs, Taiwan	<p>Kementerian Pertanian diwakili oleh Kepala Bagian Bilateral dan Kepala Sub Bagian Asia dan Pasifik. Pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 Mei 2016, dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pertemuan di <i>Council of Agriculture (COA)</i>, kami diterima oleh Mrs. Rose Dong-Chong Hsiu, Deputy Director General, Department of International Cooperation yang didampingi oleh beberapa pejabat lingkup COA dan Kementerian Luar Negeri Taiwan. Pada pertemuan ini telah disepakati beberapa 	Koordinasi dengan pihak – pihak terkait di Taiwan guna persiapan pelaksanaan penandatanganan Agreement IETO - TETO dan pertemuan <i>Consultation Meeting</i> ke-

				<p>hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draft dokumen <i>Agreement on Agriculture</i> telah disepakati oleh kedua belah pihak dan siap untuk ditandatangani. Pihak COA akan segera menyampaikan surat resmi perihal persetujuan terhadap keseluruhan isi dari dokumen <i>Agreement</i> tersebut. - Waktu untuk penandatanganan dokumen <i>Agreement</i> telah disepakati pada tanggal 12 Mei 2016, pukul 9.30, bertempat di Kantor COA, Taiwan. Penandatanganan dokumen akan dilakukan oleh Kepala IETO dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang Taiwan di Indonesia (TETO). Pihak COA Taiwan akan segera menyampaikan surat undangan resmi kepada Bapak Sekjen untuk dapat menyaksikan proses penandatanganan dokumen <i>Agreement</i> dimaksud. - Pertemuan <i>Consultation Meeting</i> pertama disepakati untuk dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016, setelah penandatanganan dokumen <i>Agreement</i>. Pada sesi pembukaan diagendakan <i>Short Remarks</i> dari Wakil Menteri Pertanian Taiwan dan dari Bapak Sekjen. Sesi pembahasan agenda pertemuan, selanjutnya akan dipimpin bersama (<i>Co-chairs</i>) oleh Kepala TETO dan IETO, didampingi oleh pejabat setingkat eselon II dari COA Taiwan dan Kementerian Pertanian RI. <p>2. Pada Pertemuan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, kami diterima oleh Bapak Siswadi, Wakil Kepala IETO didampingi oleh Kepala Bagian Perdagangan. Hasil pertemuan tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak IETO secara resmi menyampaikan 	
--	--	--	--	--	--

				<p>persetujuan terhadap usulan waktu penandatanganan <i>Agreement</i> pada tanggal 12 Mei 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak IETO menyarankan agar Bapak Sekjen meninggalkan tempat pertemuan <i>Consultation Meeting</i> setelah menyampaikan <i>Short Remarks</i> pada sesi opening. Selanjutnya, pihak IETO akan mengatur agenda kunjungan untuk Bapak Sekjen. <p>3. Kami juga berkesempatan melakukan kunjungan ke beberapa Pusat Penelitian Pertanian yang ada di Taiwan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>World Vegetable Center</i> yang merupakan lembaga internasional untuk pengembangan sayuran, dengan cakupan kegiatan yang cukup luas, meliputi pengembangan varietas unggul (dimana, lembaga ini memiliki fasilitas <i>Gene Bank</i> untuk penyimpanan sumber daya genetika sayuran), serta system produksi dan konsumsi sayuran. - <i>Tainan District Agricultural Research and Extension</i> yang merupakan lembaga penelitian dan penyuluhan untuk berbagai komoditas pertanian, seperti padi, sayuran, buah-buahan, florikultur, termasuk aspek bio-technology dan penanganan pasca panen. - <i>Livestock Research Institute</i> yang merupakan pusat penelitian ternak mulai dari aspek pembibitan (<i>breeding</i>), manajemen pemeliharaan ternak, serta pengolahan produk peternakan dan pengembangan tanaman untuk pakan ternak. 	
--	--	--	--	--	--

6.	2 – 4 Mei 2016 Yogyakarta	Perundingan ke – 3 Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA - CEPA)	Biro KLN, Kemendag, Ditjen Horti, Badan Karantina, pihak Australia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan hasil perundingan NG on TIG telah dilakukan pembahasan serta bertukar pandangan dan informasi mengenai 1) data perdagangan dan Tariff; 2) perkembangan bilateral FTA/CEPA; 3) Struktur Chapter on Trade in Goods; 4) tindak lanjut mengenai early outcomes terkait dengan perdagangan barang seperti <i>Indonesian Food Innovation Center, MRA on Food Standard, herbal products and Horticulture</i>. 2. Tindak lanjut dari perundingan NG on TIG yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kedua pihak sepakat untuk melakukan pertukaran data dan tariff pada minggu ke – 4 bulan Juni 2016. b. Kedua pihak sepakat untuk melakukan pertukaran draft <i>chapter on Trade in Goods, Rules of Origin, Customs Procedure and trade facilitation</i> pada pertengahan bulan Juli 2016. 3. Pihak Australia akan menyampaikan draft <i>Chapter on Technical Barriers to Trade dan Sanitary and Phytosanitary</i> pada pertengahan bulan Juli 2016. 4. Tindak lanjut dari perundingan <i>Exchange Data dan Tariff</i> adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada tanggal 16 Mei 2016, pihak Australia telah menyampaikan tempalte pertukaran data kepada Indonesia. b. Australia menyampaikan agar Indonesia menyampaikan data secara terpisah mengenai data Indonesia's WTO binding tahun 1995 5. BKF, Kemenkeu telah menyampaikan data 	Kementerian Pertanian akan memberikan posisi terkait kemungkinan kerjasama di bidang MRAs.
----	------------------------------	---	--	---	--

				<p>perdagangan dan tariff kepada Dit. Perundingan Bilateral.</p> <p>6. Terkait dengan potensi kerjasama di bidang <i>Mutual Recognition Agreements</i>, tindak lanjut hasil perundingan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretariat IA – CEPA akan menyampaikan data dan tariff kepada Australia pada minggu ke – 3 atau 4 Juni 2016. Diharapkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga sektor pembina dapat menyusun posisi <i>initial request and offer</i> dengan opsi urutan prioritas, misalnya posisi maksimal, moderate, dan rendah dan menggunakan AANZ-FTA dan RECP sebagai basis penyusunan posisi. <p>Diharapkan seluruh Kementerian/Lembaga dapat memeberikan masukan atas draft Chapter TG dimaksud paling lambat tanggal 15 Juni 2016.</p>	
7.	9-13 Mei 2016 Jawa Tengah	Pembekalan Potensi Pertanian Bagi Para Diplomat RI yang akan ditempatkan di Beberapa Negara Mitra	Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pembekalan ini terdiri atas paparan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Penerapan Teknologi Pertanian yang Tahan Perubahan Iklim dan Ramah Lingkungan Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Potensi Ekspor Komoditi Pertanian Kebijakan Luar Negeri Sektor Pertanian Masih terbuka peluang dalam peningkatan produksi pertanian untuk dikerjasamakan dengan negara mitra. Kegiatan ini menghasilkan kekayaan informasi mengenai berbagai kebijakan pembangunan pertanian nasional dan potensi kerja sama pertanian dengan negara mitra untuk ditindaklanjuti bersama. 	Perlu dirancang <i>plan of action</i> (rencana aksi) kerja sama bidang pertanian antara Indonesia dengan negara mitra sebagai acuan dalam melaksanakan kerja sama di masa mendatang.

8.	9-11 Mei 2016 Manado, Sulawesi Utara	Koordinasi Penjajakan Kerja Sama dengan Provinsi Sulut.	Biro KLN, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Utara.	Identifikasi potensi pertanian yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat dikerjasamakan dengan pihak Kolombia; Potensi pertanian di Provinsi Sulawesi Utara yaitu investasi untuk pengembangan penggembalaan sapi (tomohon), bunga potong (krisan), dan pengembangan ternak babi, kambing dan ayam potong di Sulawesi Utara.	Potensi pertanian Provinsi Sulawesi Utara akan kita tawarkan kepada pihak Kolombia pada saat pertemuan <i>expert group meeting on agriculture</i> pada bulan Juli 2016.
9.	11 – 14 Mei 2016, Taipei, Taiwan	Penandatanganan Agreement on Agriculture IETO – TETO dan pelaksanaan pertemuan konsultasi pertama IETO - TETO	Biro KLN, KDEI, Council of Agriculture, Taiwan, Ministry of Foreign Affairs, Taiwan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertanian diwakili oleh Bapak Sekjen, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kepala Sub Bagian Asia dan Pasifik, dan Staf Bagian Bilateral. 2. Rencana kerjasama Badan Litbang Pertanian dengan AVRDC. 3. Rencana kerjasama Badan SDM Pertanian dengan <i>Council of Agriculture</i>, Taiwan untuk pengembangan capacity jangka pendek dan jangka panjang (sholatship program S2 dan S3) 4. Rencana kerjasama pengembangan komoditi buah naga dan angrek Ditjen Hortikultura dengan <i>Council of Agriculture</i>, Taiwan 	Koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait.
10.	16 Mei 2016,	Koordinasi Peningkatan Kerja	Duta Besar Argentina,	1. Dalam meningkatkan kerja sama bilateral di	Melakukan pertemuan koordinasi

	Bogor	Sama Bidang Pertanian	Duta Besar Kuba, Duta Besar Georgia, Duta Besar Mongolia, perwakilan dari Kedutaan Besar negara mitra di Jakarta, Kementerian Luar Negeri, IPB, Biro KLN, Kementerian Pertanian	bidang pertanian, Indonesia telah memiliki nota kesepakatan (<i>Memorandum of Understanding/MoU</i>) dengan negara-negara mitra sehingga harus diwujudkan melalui rencana kerja di masa mendatang. 2. Dalam pertemuan ini ditekankan peningkatan peran perwakilan negara mitra di Jakarta dalam memfasilitasi komunikasi dengan semua instansi terkait. 3. Meningkatkan peran Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian dalam memfasilitasi komunikasi dengan instansi teknis lingkup Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan isu krusial dibawah masing-masing negara mitra.	secara rutin minimal 3 kali dalam setahun, yaitu pada awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun.
11.	17 - 28 Mei 2016 NTB, Jawa Barat, Sulut, NAD, Sumut, Sumbar, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung	Mendampingi Tim Survey dari JICA dalam pengumpulan data terkait dengan Public-Private-Partnership for Activating Agricultural Promotion	Kementerian Pertanian Pemda dan Dinas Pertanian dimasing-masing propinsi dan JICA	Studi ini bertujuan untuk kontribusi pengembangan pertanian di Indonesia dengan upaya menyelaraskan program di Pemda Jepang dengan Pemda yang ada di Indonesia. Kementan telah mengusulkan 10 Kabupaten dan Kota dari 9 propinsi yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 5 kabupaten dan kota yang akan dimitrakan dengan 5 Pemda di Jepang. Program kemitraan Pemda dan Swasta ini untuk mendorong hal-hal sebagai berikut: 1. Proyek dukungan kegiatan UKM di luar negeri 2. Mendorong P to P 3. Penyebaran teknologi swasta jepang 4. Grass-root kerjasama teknis 5. Kerjasama teknis dengan Pemda Jepang	Mempersiapkan study visit dari tim JICA selanjutnya yang akan dilaksanakan perkiraan tanggal 24 - 31 Juli 2016
12.	20-21 Mei 2016 di Jogjakarta	Pelaksanaan Workshop Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra Kawasan Afrika	Seluruh Unit eselon satu Kementan, Kemenlu, Univ Muhammadiyah Yogya, Universitas Gajah Mada,	1. Pada tanggal 20-21 Mei 2016 telah diselenggarakan Workshop Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra Kawasan Afrika di Yogyakarta	Finalisasi Draft Grand Design dan Diseminasi

			<p>Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Dinas Pertanian Yogyakarta, dll</p>	<p>guna mensosialisasikan dan memperoleh masukan penyempurnaan Grand Design dimaksud.</p> <p>2. Sebagai narasumber pada Workshop tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Afrika, Kementerian Luar Negeri • Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB • Presiden Asosiasi Konsul Kehormatan Indonesia • Peneliti, PSEKP <p>Dan dihadiri oleh wakil-wakil dari eselon I lingkup Kementan, K/L lingkup Pemerintah Pusat, UPT lingkup Kementerian Pertanian, SKPD Propinsi dan Kabupaten dan kalangan akademisi.</p> <p>3. Adapun beberapa hasil masukan workshop diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejauh ini Pemerintah Indonesia telah banyak memberikan bantuan ke beberapa Negara Afrika khususnya bidang pertanian, namun bantuan tersebut lebih kepada charity. Oleh karena itu melalui penyusunan grand design ini diharapkan dapat mengidentifikasi problem dan merumuskan program apa yang diberikan baik jangka menengah maupun jangka panjang. - Saat ini Afrika adalah merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk kerjasama perdagangan, pembangunan ekonomi dan investasi. Selain memiliki keterikatan sejarah dan budaya dengan Indonesia, beberapa Negara Afrika masuk dalam 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Selain itu sumber energy untuk 	
--	--	--	---	---	--

				<p>masa depan yang besar ada di Afrika serta memiliki ½ cadangan emas dan intan di dunia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adapun sektor pertanian, 45 % dari lahan produksi pertanian dunia terdapat di Afrika, menyerap sekitar 65% tenaga kerja dan berkontribusi sebanyak 32% total GDP Afrika. Selain itu beberapa wilayah Afrika memiliki sumber daya air yang melimpah (baru 2-3% sumber daya air terbarukan yang dimanfaatkan, dibanding 5% di seluruh dunia), memiliki peluang pasar makanan dan agribisnis lebih dari USD 1 triliun pada 2030. - Slogan “Green Revolution” yaitu peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan infrastruktur baru di Afrika. Hal ini berpotensi meningkatkan output sector pertanian sekitar USD 500 milyar (2020) dan USD 880 milyar (2030). Produksi meningkat 2 kali lipat dalam 20 tahun, peningkatan pasar upstream USD 8 milyar pertahun (2014) dan USD 35 milyar pertahun (2030), dan peningkatan pasar downstream USD 40 milyar pertahun (2014) hingga USD 240 milyar pertahun (2030). - Adapun tantangan yang dapat menjadi peluang kerjasama pertanian dengan afrika diantaranya; pola pertanian yang masih tradisional, penggunaan input pertanian yang rendah, SDM pertanian yang belum memadai, minimnya <i>research</i>, 37 dari 47 negara Afrika sub-sahara merupakan <i>net food importer</i>. Adapun peluang tersebut yaitu ekspor peralatan pertanian, bibit dan pupuk, pelatihan dan pengiriman tenaga ahli, joint research, pemanfaatan pasar 37 negara net food 	
--	--	--	--	--	--

				<p>importer serta investasi industry alsintan, perkebunan/agribisnis, kimia dan food processing.</p> <p>3. Selain peluang dan potensi, terdapat tantangan kerjasama Indonesia dengan Afrika diantaranya; Adanya persepsi bahwa dengan Negara Afrika kurang penting dibandingkan dengan Negara maju, kerjasama ditekankan pada aspek teknis sehingga cenderung kehilangan nilai strategis dan substantif dalam konteks pencapaian kepentingan nasional, belum ada perumusan dan ukuran yang jelas tentang target kepentingan nasional yang hendak dicapai serta belum ada mekanisme pendanaan.</p>	
13.	23-28 Mei 2016 Hongaria	Kunjungan kerja Delegasi Kementerian Pertanian RI ke Hongaria.	Staf Ahli Menteri Pertanian RI; Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementan; Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Kemenlu.	<p>1. Pada 24-28 Mei 2016 Delegasi Kemtan RI (Delri) telah berkunjung ke Budapest. Delri dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Pertanian, Syukur Iwantoro dan didampingi wakil dari Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kemtan, Direktorat Eropa Tengah dan Timur (ETT) Kemlu, serta KBRI Budapest. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Pertanian RI, Dr. Amran Sulaiman, dengan Menteri Pertanian Hongaria, Dr. Sandor Fazekas, tanggal 1 Februari 2016 di Jakarta, yang menyepakati beberapa hal, yaitu: 1) peningkatan ketahanan pangan dan perdagangan produk pertanian kedua negara; 2) peninjauan investasi Hongaria pada pengembangan gandum, serta komoditi strategis Indonesia khususnya jagung, gula dan ternak sapi, dan 3) pembentukan payung kerja sama bidang pertanian Indonesia-Hongaria.</p> <p>2. Pada kunjungan ini, selain melakukan</p>	<p>1. Peluang kerja sama yang dapat dilakukan dengan pihak Hongaria yaitu penelitian bersama untuk pengembangan bibit unggul gandum tropis, yang sesuai dengan iklim di Indonesia.</p> <p>2. Dari perspektif perdagangan, ekspor gandum Hongaria ke Indonesia mempunyai peluang, namun perlu pengkajian lebih lanjut dari aspek bisnisnya.</p> <p>3. Untuk merealisasikan kerja sama pertanian RI-Hongaria, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:</p> <p>a. Percepatan penanda tanganan MoU Kerja Sama Pertanian oleh kedua Menteri Pertanian yang final <i>draft</i>-nya sudah dibahas dan disepakati oleh tim teknis</p>

			<p>pertemuan bilateral dengan delegasi Kemtan Hongaria, Delri juga melakukan kunjungan ke <i>Cereal Research, Ltd.</i> di kota Szeged, Penelitian Beras di kota Szarvas, <i>Centre for Agricultural Research</i> serta kunjungan ke pusat produksi dan pemrosesan gandum Gyemerlyi, Ltd.</p> <p><u>Kunjungan ke <i>Cereal Research Ltd, Szeged, 25 Mei 2016</i></u></p> <p>3. Lembaga penelitian ini merupakan pusat penelitian <i>non-profit</i> semi swasta yang fokus pada pengembangan benih sereal seperti gandum, jagung, sorgum, <i>rapeseed, barley</i> dan <i>sunflower</i>. Untuk komoditi gandum, <i>Cereal Research Ltd, Szeged</i> melakukan penelitian pada <i>spring wheat, triticale, oat</i>, dan <i>durum wheat</i>. Benih <i>spring wheat</i> diperoleh dari Brazil yang merupakan jenis gandum yang cocok dikembangkan di daerah tropis. Rata-rata produksi gandum yang dihasilkan pada skala penelitian tersebut mencapai 6-7 ton/ha.</p> <p>4. Delri menyampaikan harapan adanya kerja sama konkret di masa yang akan datang, khususnya dalam mengembangkan bibit gandum tropis dengan kadar protein yang tinggi (di atas 11%).</p> <p><u>Working dinner dengan <i>Deputy State Secretary for Agriculture Economy, Ministry of Agriculture, Mr. Zsolt Feldman. 25 Mei 2016</i></u></p> <p>5. Delri menyampaikan keinginan kuat untuk melakukan kerja sama pengembangan gandum; mendorong peran Hongaria sebagai <i>hub</i> bagi negara-negara di sekitarnya untuk memasarkan komoditi pertanian Indonesia seperti kopi, teh dan rempah-rempah; serta mengundang investor Hongaria untuk mengembangkan komoditi strategis Indonesia.</p>	<p>kedua pihak pada saat pertemuan bilateral, paling lambat bulan Juli 2016 secara sirkular;</p> <p>b. Pembentukan <i>Joint Agricultural Working Group (JAWG)</i>;</p> <p>c. Secara bersama-sama mengupayakan untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pelaksanaan aktivitas maupun program kegiatan dalam kerangka MoU ini dari lembaga donor internasional.</p>
--	--	--	---	--

				<p>Delri juga menekankan pentingnya percepatan finalisasi MoU Kerja Sama Pertanian. Mr. Zsolt Feldman menyambut baik keinginan untuk memperkuat kerja sama sektor pertanian kedua belah pihak tersebut.</p> <p><u>Pertemuan Bilateral Delri dengan Delegasi Kemtan Hongaria, 26 Mei 2016</u></p> <p>6. Delegasi Kemtan Hongaria dipimpin Kepala Departemen Internasional Kemtan Hongaria, Zsolt Belánszky-Demkó.</p> <p>7. Pihak Hongaria menyambut baik usulan Indonesia untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi di bidang pertanian serta kerja sama teknis, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan bibit gandum tropis, - <i>transfer of knowledge and technology</i> dari Hongaria terkait <i>wheat cultivation, post harvest</i>, dan <i>wheat processing</i>; - kerja sama pertukaran peneliti dan antar perguruan tinggi di bidang pengembangan gandum; <p>8. Kedua pihak sepakat untuk memfinalisasikan <i>draft</i> MoU sebagai landasan kerangka kerja sama pertanian kedua negara, termasuk menyepakati penambahan klausul usulan Indonesia tentang kemungkinan para Pihak memperoleh pendanaan melalui mekanisme bilateral maupun multilateral lainnya, guna membiayai program atau aktivitas dalam kerangka MoU ini.</p> <p>9. Kedua pihak sepakat untuk menandatangani</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>MoU secara sirkular dan diharapkan selesai pada Juli 2016. Selanjutnya, kedua pihak akan membahas rencana aksi implementasi MoU tersebut.</p> <p>10. Kedua delegasi juga berbagi informasi terkait kapasitas pertanian masing-masing. Pihak Hongaria menyampaikan bahwa gandum Hongaria bebas dari GMO dan merupakan gandum yang termurah di kawasan Eropa dengan kualitas yang sangat baik. Harga gandum di Hongaria pada tingkat produsen mencapai US\$ 200/ton. Rata-rata produksi gandum sekitar 4,5 juta ton/tahun, dengan konsumsi sebesar 2,5-2,7 juta ton/tahun dan ekspor mencapai 1,4-2,5 juta ton/tahun. Sementara rata-rata produksi jagung di Hongaria mencapai 7,5 juta ton/tahun, dengan konsumsi sekitar 4,5-4,7 juta ton/tahun dan ekspor sebesar 3-5 juta ton/tahun.</p> <p>11. Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan potensi pertanian dan upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Saat ini rata-rata produksi beras di Indonesia mencapai 30-35 juta ton/tahun dan rata-rata produksi jagung mencapai 17 juta ton/tahun. Sementara untuk kebutuhan gandum di dalam negeri, Indonesia masih melakukan impor dari beberapa negara seperti Australia, USA, Kanada, Turki dan China. Delegasi Indonesia juga menyampaikan potensi ekspor komoditi strategis seperti CPO, kopi, teh, dan <i>frozen semen</i>.</p> <p>12. Hongaria menawarkan untuk menjadi sumber alternatif suplai gandum Indonesia. Kemungkinan impor gandum dari Hongaria</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>memerlukan kajian terkait jalur impor, mengingat Hongaria merupakan <i>landlocked country</i>. Beberapa alternatif yang disampaikan pihak Hongaria, diantaranya, melalui pelabuhan Constanta di Romania, Koper di Slovenia atau Trieste di Italia.</p> <p>13. Pada akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati adanya <i>minutes of meeting</i> sebagai dokumen tertulis hasil pertemuan dan pamarafan teks MoU Kerja Sama Pertanian RI-Hongaria (terlampir).</p> <p><u>Kunjungan ke <i>National Agricultural Research and Innovation Centre (NARIC) Szarvas</i>. 26 Mei 2016</u></p> <p>14. NARIC merupakan pusat penelitian dibawah Kementerian Pertanian Hongaria yang melakukan beberapa bidang penelitian seperti <i>fishery, crop breeding, ornamental plant, fruit and vegetable breeding, viticulture and vine research, animal breeding and husbandry, irrigation and water management, agriculture machinery, food science and agriculture environmental</i>.</p> <p>15. NARIC juga telah melakukan kajian bidang tanaman padi dalam skala terbatas. Delri menawarkan kepada pihak Hongaria untuk saling bertukar pengalaman di bidang tersebut, mengingat Indonesia telah memiliki kajian tanaman padi yang sangat maju.</p> <p><u>Kunjungan ke <i>Centre for Agricultural Research</i>, 27 Mei 2016</u></p> <p>16. <i>Center for Agricultural Research (CAR)</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>merupakan lembaga penelitian dibawah <i>Hungarian Academy of Science</i> yang memfokuskan pada penelitian pemuliaan berbagai jenis tanaman, khususnya gandum dan jagung. Prestasi lembaga ini, diantaranya, penemu pertama jagung hibrida di Eropa.</p> <p>17. Pada kesempatan tersebut delegasi mendapatkan gambaran mengenai kemajuan penelitian, pemuliaan tanaman jagung dan gandum dengan teknologi yang modern dengan menggunakan teknologi <i>phytotron</i>. Lembaga ini terbuka untuk kerja sama di bidang pemuliaan tanaman sereal.</p> <p><u>Kunjungan ke <i>Wheat Processing Production Center Gyermelyi</i></u></p> <p>18. Pada kunjungan ini, delegasi memperoleh gambaran tentang kemajuan Hongaria dalam industri pengolahan gandum yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Produk industri pangan ini diantaranya pasta yang diproses secara modern dan higienis. Produk dari perusahaan ini menguasai 80% pangsa pasar Hongaria dan juga merupakan pesaing kuat produk sejenis di Pasar Eropa.</p> <p>19. Dalam jangka panjang, ada kemungkinan perusahaan ini akan melakukan ekspansi baik dalam perluasan pasar ekspor produknya maupun investasi di negara Asia, termasuk Indonesia.</p>	
14.	27 Mei 2016 Bogor	Pertemuan <i>Review</i> Capaian Kerja Sama Bilateral Bidang Pertanian	Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, IPB	1. Perjanjian bilateral Indonesia dengan negara mitra terbagi dalam 3 kawasan, yaitu Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta Afrika dan Timur Tengah. Adapun total keseluruhan perjanjian kerja sama dari ketiga kawasan dimaksud sebanyak 45 perjanjian.	

				<p>2. Dengan adanya perbedaan produk-produk pertanian antara Indonesia dengan negara mitra, maka dapat dijadikan potensi perjanjian untuk pasar ekspor Indonesia di negara tersebut. Indonesia harus tetap aktif dan responsif dalam menjalin kerja sama bilateral yang baik.</p> <p>3. Selain perdagangan produk pertanian, dapat menjalin pula kerja sama dalam bentuk pelatihan teknologi baru atau cara-cara peningkatan produktivitas dari komoditas pertanian.</p> <p>4. Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian domestik sehingga dapat meningkatkan daya saing.</p>	
BAGIAN REGIONAL					
1.	5-6 Mei 2016 Di Siem Reap, Kamboja	Pertemuan <i>The 4th Meeting Of ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council</i>	Negara anggota ASEAN beserta China, Jepang dan Korea (<i>APTERR Council</i>)	<p>1. Seluruh anggota <i>APTERR Council</i> menyambut baik terpilihnya Chanpithya Shimpalee sebagai GM yang baru dan mendukung segala bentuk pelaksanaan program kerjanya kepada APTERR</p> <p>2. Indonesia telah melunasi EF, namun adanya kekurangan untuk bank fee/OC sebesar US\$ 50,84 akan diusulkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk membayar kekurangan tersebut setelah <i>APTERR Council</i> ke-4</p> <p>3. <i>General Manager</i> yang baru terpilih, menyampaikan program kerja 3 tahunnya: a)</p>	<p>1. Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan akan mempersiapkan segala proses persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan ke-5 <i>APTERR Council</i> pada awal bulan Mei 2017 di Bali.</p> <p>2. Badan Ketahanan Pangan akan berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri terkait sisa pelunasan <i>Operasional Cost</i> yang menjadi kewajiban</p>

				<p><i>The current situation of the APTERR operations; b) Problems and Constraints; c) Proposed 3 years Work Plans (2016-2018) seperti, the implementation of the APTERR programmes; the Food Emergency Monitoring and Information (FEMI); dan the administrative and financial management of the APTERR Secretariat. Disamping itu GM yang baru juga menyampaikan Timeframe for the APTERR Secretariat Work Plan 2016-2018</i></p> <p>4. Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan ke-5 APTERR Council, yang rencananya akan diselenggarakan pada minggu pertama bulan Mei tahun 2017 di Bali.</p>	Indonesia setidaknya sebelum pelaksanaan pertemuan ke-5 APTERR Council.
2.	9 Mei 2016; Bogor	Rapat Pertemuan Tindak Lanjut RCEP WGTIG 12 dan Penyusunan Non-Paper Indonesia	Kemenlu,; Kementan, Kemenkeu; Kem LHK, KKP; Kem. ESDM; BPOM dan Kemenperin	<p>1. Direktur Perundingan ASEAN (DPA) menyampaikan perkembangan perundingan pada putaran RCEP ke-12, di Perth bulan April 2016, diantaranya mengenai RCEP <i>Market Access</i>, dimana China, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India telah menyampaikan <i>non-paper</i> dalam proses kelanjutan perundingan setelah disampaikannya <i>initial offer</i>.</p> <p>2. Rapat memandang pentingnya mengurangi <i>gap</i> antara <i>tier 1</i>, <i>tier 2</i> dan <i>tier 3</i> secara bertahap sampai mencapai <i>common concession</i> sebagaimana tercantum dalam BCIO, serta rencana Indonesia untuk <i>request</i> negara ASEAN lain dalam kaitannya dengan <i>cumulation</i>.</p> <p>3. Wakil Pertanian telah menyampaikan <i>request list (high call dan fall back)</i> yang menjadi pos binaan Kementerian Pertanian melalui Kementerian Perdagangan sebanyak 60 pos tarif kepada 4 (empat) AFPs, yaitu 9 pos tarif ke China, 25 pos tarif ke India, 17 pos tarif ke</p>	<p>1. Pimpinan rapat mengharapkan agar Kementerian/Lembaga dapat menyampaikan pandangan dan masukan terhadap non-paper dari China, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India, serta masukan <i>non-paper</i> Indonesia kepada AMS's.</p> <p>2. Pimpinan rapat juga meminta Kementerian/Lembaga yang belum menyampaikan <i>initial offer</i> dan/atau <i>request list</i> agar segera menyampaikannya paling lambat 1 Juni 2015.</p>

				<p>Korea, dan 9 pos tarif ke Jepang.</p> <p>4. Untuk memenuhi angka aspirasi sesuai BCIO (Basic Concept Initial Offer), DPA telah menyusun Kertas Kerja IO 65% dan 15%, berdasarkan masukan dari K/L terkait (berdasarkan tindak lanjut hasil rapat kordinasi Kemenko bulan Januari 2016) dan mengkombinasikan dengan <i>current IO</i> yang telah disampaikan yaitu: Kategori A: 39,8%; Kategori B: 14,1%; Kategori B*: 13,8%; dan Kategori C: 32,3%. DPA juga telah menyusun <i>priority request</i> Indonesia, berdasarkan masukan K/L terkait dan akan disampaikan sesegera mungkin agar dapat dipertimbangkan oleh AFPs dalam IO maupun <i>revised offers</i> AFPs.</p> <p>5. Beberapa parameter yang disepakati dalam rangka tahapan perundingan <i>goods</i> selanjutnya, yaitu untuk seluruh negara RCEP agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi <i>threshold</i> liberalisasi dalam BCIO; Menyampaikan <i>request</i> sebelum putaran Auckland; Merespon positif seluruh <i>request</i> yang diterima dalam upaya meningkatkan <i>offer</i>; Mempertimbangkan cakupan nilai perdagangan bilateral 	
3.	15 Mei 2016, UNCC	Sidang Komisi ESCAP – Senior Official Segment (SOS)	Biro KLN, Balitbangtan Kemlu	<p>1. Pada isu <i>macroeconomic policy, poverty reduction and inclusive development</i>, dibahas hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan membahas hasil pertemuan GC CAPSA ke-12 yang telah dilaksanakan bulan Februari 2016 di Bangkok, Thailand. 7 (tujuh) negara menyampaikan intervensinya, yaitu: Tiongkok, 	1. Biro KLN perlu mengawal komitmen Badan Litbang untuk meningkatkan kontribusi in-kind seperti yang telah disampaikan pada Sidang Komisi UNESCAP ke-72 ini, agar dapat diimplementasikan sesuai target.

				<p>Bangladesh, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan. Poin-poin intervensi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tiongkok. Dalam rangka pencapaian SDGs, Tiongkok mendukung segala upaya untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ESCAP. ii. Bangladesh. Pencapaian SDGs masih merupakan tantangan yang sulit bagi Negara-negara LDCs khususnya dalam <i>capacity building and technology development</i>. Bangladesh mendukung kerjasama ekonomi regional dan sub regional ESCAP. iii. India, telah mendukung salah satu program ESCAP yakni kerjasama selatan-selatan dengan bekerjasama dengan <i>public-private-sector</i>. Selain itu India juga memiliki program pemerintah untuk meningkatkan penghasilan petani melalui beberapa training dan sharing pengetahuan. iv. Pakistan akan memberikan <i>pledge</i> kontribusi untuk CAPSA sebesar 7.000 USD mulai tahun 2016. v. Korea Selatan akan meningkatkan kontribusinya dua kali lipat pada ESCAP. <p>c) DELRI menyampaikan beberapa intervensi, diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sesuai dengan hasil pertemuan <i>Governing Council CAPSA ke-12</i>, Indonesia sebagai <i>host country</i> CAPSA, Indonesia akan tetap mendukung keberadaan CAPSA, melalui peningkatkan kontribusinya terhadap CAPSA khususnya melalui 	<p>2. Pada pertemuan persiapan delri di KBRI Bangkok, Kemtan telah menyampaikan bahwa Kemtan telah mengirimkan dokumen kajian keanggotaan RI pada CAPSA sebagai prasyarat pengajuan kenaikan <i>pledge</i> kontribusi pada Tim Pokja Kontribusi. Pihak KBRI akan berkoordinasi secara internal dengan Sesditjen Multilateral Kemlu selaku ketua Tim Pokja Kontribusi untuk pengawalan dan langkah selanjutnya.</p> <p>3. Terkait dengan adanya pemindahan tuisi PSE-KP dari balitbangtan ke Setjen, serta untuk memperluas cakupan pemanfaatan kerjasama CAPSA di lingkup Kementerian yang bersifat lintas sektoral, maka perlu dipertimbangkan pengalihan focal point CAPSA dari Balitbangtan ke Setjen, dengan catatan bahwa kontribusi in-kind operasional Host Country CAPSA tetap berada dibawah DIPA Badan Litbangtan.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>kontribusi in-kind melalui beberapa program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2017, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Promote research and synthesize research findings from across the region on issues related to climate resilient agriculture for ensuring food security;</i> b. <i>Develop capacity of local governments for introduction and implementation of policy recommendations and good practices for the improved the sustainability of agriculture, food security, poverty and nutrition;</i> c. <i>Developing collaborative efforts between across the region to promote innovation and technology transfer to improve agricultural productivity and sustainability as well as poverty alleviation</i> d. <i>Disseminate policy recommendations and good practices to policymakers, opinion leaders and civil society.</i> <ol style="list-style-type: none"> ii. Untuk kontribusi in-kind CAPSA tahun 2016, Indonesia akan memberikan 445.000.000 IDR untuk mendukung biaya operasional kantor CAPSA, selain itu untuk program CAPSA yang dikerjasamakan dengan negara anggota lainnya, Indonesia akan memberikan bantuan senilai 1 Miliar Rupiah. iii. Selain itu, Indonesia juga menyerukan agar negara-negara anggota GC CAPSA memenuhi komitmennya untuk meningkatkan kontribusi pada CAPSA, dengan besaran minimal USD 30,000 untuk negara <i>middle-</i> 	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>income country</i>, dan minimal USD 7,000 untuk negara-negara berkembang lainnya.</p> <p>d) Sekretariat ESCAP mengapresiasi intervensi negara-negara anggota ESCAP. Ditegaskan kembali bahwa untuk meningkatkan peran dan keberadaan CAPSA, maka seluruh Negara anggota harus mendukung keberadaannya dengan meningkatkan pendanaan termasuk berkolaborasi dalam beberapa program.</p> <p>2. Sementara itu pada sesi trade and investment, negara anggota membahas hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Trade and Investment, khususnya CSAM. Pertemuan membahas hasil pertemuan GC <i>Centre for Sustainable Agriculture Mechanization (CSAM)</i> ke 11 yang telah dilaksanakan pada tahun 2015.</p> <p>b) 4 (empat) negara memberikan intervensi, yaitu Tiongkok, Thailand, Bangladesh, India. Poin-poin penting diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tiongkok akan meningkatkan kontribusinya pada CSAM, dan juga dukungan pragmatis. ii. Thailand. Mengapresiasi kinerja CSAM dan launching ANTAM dalam rangka mendukung <i>cross border trade, reducing food losses</i>. Thailand meminta CSAM untuk menyediakan <i>capacity building</i> untuk mempromosikan mekanisme pertanian berkelanjutan. iii. India, menginfokan bahwa terkait isu perdagangan, India telah
--	--	--	--	---

				<p>menetapkan tariff untuk semua barang yang termasuk dalam <i>duty free trade tariff</i>. Lebih lanjut disampaikan bahwa India juga telah melakukan kesepakatan dengan Negara ASEAN (ASEAN-FTA) dan pada pertemuan RCEP yang akan dilaksanakan di Auckland, untuk beberapa tariff barang. Selain itu juga diinfokan bahwa India telah memiliki Single Window for facilitating trade dengan nama SWIT (<i>Single Window India Trade</i>)</p> <p>Salah satu draft resolusi Indonesia yang telah difinalkan yaitu: <i>Statute of the Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture</i>.</p>	
4.	16 Mei 2016	Rapat Koordinasi Penajaman BIMP-EAGA Vision (BEV 2025)	Perwakilan Tetap RI untuk ASEAN, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, KKP dan Kementan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan rapat menginformasikan bahwa <i>framework BEV 2025</i> sudah disepakati oleh para Menteri BIMP-EAGA pada Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-19, tanggal 10 Desember 2015 dan ini merupakan pengganti dari BIMP-EAGA <i>Implementation Blueprint (IB) 2012-2016</i> serta mendukung ASEAN <i>Vision 2025</i>. <i>BEV</i> merupakan strategi jangka panjang BIMP-EAGA untuk periode 2017-2025. Visi <i>BEV</i> adalah: <i>Resilient, Inclusive, Sustainable and Economically Competitive Sub Region (RISE- BIMP EAGA)</i> dan difokuskan pada 3 (tiga) sektor utama, yaitu: industri ramah lingkungan, pertanian dan perikanan, serta pariwisata yang merupakan kekuatan utama dalam BIMP-EAGA. 2. Sasaran <i>BEV</i> diharapkan jelas dan dapat diukur secara kuantitatif, untuk itu diperlukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan <i>Sector Strategies</i> dari <i>BEV 2025</i> dalam pelaksanaan SPM BIMP-EAGA 2016 pada Februari 2016 di Davao, Filipina, <i>Cluster Agribusiness</i> menyepakati 3 (tiga) komoditas prioritas yang diusulkan masuk kedalam <i>BEV 2025</i>, yaitu: Padi, Jagung dan Ikan. Berdasarkan hasil kesepakatan dimaksud, ADB memberikan arahan agar sebaiknya usulan komoditas prioritas dimaksud paling tidak ada 5 (lima), bukan hanya 3(tiga). 2. Terkait dengan arahan ADB

				<p>peran pemerintah daerah dan swasta dalam setiap tahapannya. Guna memaksimalkan pemanfaatan kerjasama ini melalui BEV 2025, perlu disusun <i>Strategic Framework</i> dengan memperhatikan prioritas nasional masing-masing negara. Prioritas pembangunan Indonesia tertuang didalam RPJMN 2015-2019, untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi/ sinergi antara BEV dan RPJMN, agar proyek-proyek yang akan diusulkan didalam BIMP-EAGA dapat sejalan dan mendukung prioritas pembangunan Indonesia yang ada dalam RPJMN.</p> <p>3. Arahan <i>Senior Official</i> untuk BEV 2025, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cluster/ WG</i> harus lebih fokus pada <i>Goal, Objective</i> dan <i>Strategies</i> yang bersifat jangka panjang dan dapat dicapai pada periode tersebut. • Proyek prioritas yang diusulkan harus jelas tujuan yang ingin dicapai dengan disertai kerangka kerja dan saling mendukung antar <i>Cluster/WG</i> dalam mewujudkan tujuan BIMP-EAGA. • Perlu dibuat suatu mekanisme yang baku untuk membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang bersifat lintas sektor. Mekanisme ini perlu dimasukkan kedalam BEV 2025. • Perlu penguatan dan kesepahaman dari masing-masing <i>Cluster/WG</i> untuk saling berkoordinasi dalam mewujudkan tujuan kerjasama. 	<p>untuk memasukkan 5 (lima) usulan komoditi prioritas, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta masukan usulan komoditi lain yang dapat diusulkan, yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh propinsi-propinsi yang berada diwilayah BIMP-EAGA</p>
5.	17-18 Mei 2016 Ankara	Sidang 32 nd Follow-Up Committee COMCEC	Kemdag, Kemtan dan KBRI Ankara	<p><i>Increasing Productivity of Agriculture Sector and Sustaining Food Security</i></p> <p>1. Pertemuan ke-7 COMCEC Agriculture WG membahas mengenai kehilangan pangan</p>	<p>Dalam rangka menghadapi pertemuan-pertemuan WG yang akan dilaksanakan pada periode September-Oktober 2016, diharapkan <i>focal point</i> dari masing-</p>

				<p>(food losses), yang sangat berpengaruh pada situasi ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian, kehilangan pangan pada kegiatan <i>on-farm</i> sebesar 23-29% dari total produksi dikawasan Asia dan Afrika. Tema pertemuan working group berikutnya: <i>Post-harvest losses</i> dan <i>food waste</i>.</p> <p>2. Organisasi khusus OKI dalam bidang ketahanan pangan (IOFS) telah diresmikan pada tanggal 28 April 2016. Sebanyak 25 negara anggota OKI telah menandatangani statuta IOFS. Kazakhstan, Burkina Faso, dan Nigeria telah meratifikasi statute IOFS.</p> <p>3. General Assembly IOFS telah menyetujui rencana aksi 5 tahun, yang didalamnya memfokuskan pada 5 kegiatan utama, beberapa diantaranya: (i) Database untuk memantau kondisi ketahanan pangan negara-negara anggota, (ii) <i>establishment of SMEs fund</i>, (iii) <i>The IOFS Investment Program</i>.</p> <p>4. Upaya pencapaian ketahanan pangan dikawasan akan difokuskan pada 4 (empat) hal utama, yaitu penurunan efek negatif perubahan iklim, efisiensi pertanian, pemberdayaan perdesaan dan penurunan kehilangan hasil dan pemborosan pangan.</p> <p>5. Sidang Komite <i>Follow-up</i> menyepakati <i>draft</i> agenda COMCEC Sesi ke-32 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-24 November 2016 di Istanbul, Turki</p>	<p>masing WG di Kementerian/Lembaga terkait dapat berpartisipasi dan berperan lebih aktif. Selain itu, Indonesia dapat mengajukan usulan proyek pada <i>fourth project call COMCEC Project Funding</i> di bulan September 2016 mendatang. K/L terkait yang tertarik dengan proyek kerja sama ini diharapkan dapat segera mempersiapkan materi dan anggaran yang diperlukan.</p>
6.	18-20 Mei 2016 Yogyakarta	Menghadiri pertemuan The 19th Meeting of the National Focal Point for the ASEAN Cocoa Club (ACC) on ASEAN Cooperation and Joint Approaches in Agriculture and	Ditjen Perkebunan, Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Dit APEC Soil, Kemendag, Puslitkoka dan Biro KLN	Pertemuan sepakat memperbaharui Strategic Plan of Action of ASEAN Cooperation in Cocoa Sector 2016-2020	Biro KLN selaku Focal Point dari pertemuan Joint Commission on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme (JCM) perlu meminta

		Forestry Products Promotion Scheme			komitmen pada seluruh AMS pada Sidang JCM ke 23 mendatang, untuk pertemuan-pertemuan serupa dibawa forum JCM.
7.	24-25 Mei 2016 BPTP Sumatera Selatan	Koordinasi Kerjasama IMT-GT	Biro KLN dan BPTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi diterima oleh Kepala Balai Pengujian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan, DR. Harmanto, dan plt. Kepala Seksi Kerja Sama Pengujian dan Pelayanan (KSPP). 2. Dalam koordinasi ini, diinformasikan terkait perkembangan kerjasama IMT-GT (<i>Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle</i>) yang lambat yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan kerjasama ini. 3. Selain itu, saat ini Biro KLN Kementerian Pertanian selaku focal point WGAAE (<i>Working Group on Agriculture, Agro-based Industry, and Environment</i>) IMT-GT sedang melakukan upaya percepatan informasi kerjasama IMT-GT melalui pemanfaatan aplikasi berbagi dokumen pada website Biro KLN. 4. Kepala BPTP menyampaikan dukungan beliau dalam upaya KLN untuk mempercepat arus informasi untuk mengembangkan kerjasama IMT-GT khususnya bidang pertanian. 5. Kemudian, beliau juga menugaskan plt. Kepala Seksi KSPP sebagai coordinator percepatan arus informasi ini, yang kedepannya akan membantu Biro KLN untuk menyampaikan informasi kepada SKPD terkait di wilayah Sumsel dan juga mengunggah proposal kerjasama dari Sumatera Selatan. 6. Beliau menyampaikan tantangan yang dihadapi antara lain: koneksi internet yang 	Biro KLN akan melegalisasi focal point tersebut ke dalam SK Sekjen

				belum stabil, yang mungkin akan menghambat percepatan arus informasi, sehingga diingatkan bahwa selain melalui teknologi informasi, komunikasi yang intensif juga diperlukan untuk mendukung upaya ini.	
8.	25 Mei 2016; Hotel Double Tree, Jakarta	Rapat Persiapan Pertemuan 13 th RCEP-TNC <i>and Related Meetings</i> di Auckland, Selandia Baru	Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kem Luar Negeri; Kementan, Kemenkeu; Kem LHK KKP; Kem. ESDM; Badan POM dan Kemenperin.	<p>1. Pimpinan menyampaikan, dlm rangka pemenuhan/penambahan Kategori A, mengingat RCEP lebih ditekankan pada <i>cumulation</i> & yang akan mengalami dampak adalah manufaktur, maka dlm rgka menyusun kepentingan nasional dan meminimalkan <i>risks</i>, disepakati pendekatan sbb:</p> <p>i) Jika MFN 2015 0% maka dapat langsung di-<i>offer</i></p> <p>ii) Jika MFN 2015 > 0% maka :</p> <p>a) TBM dalam 4 FTAs (AANZ, AK, AC, AJCEP) sudah 0% di tahun 2018</p> <p>b) Skenario 1: Jika ASEAN-India sudah 0% dan <i>offers</i> belum A, maka: apakah ada dampak GVC; jika tidak ada isu GVC langsung masuk Kat. A; jika ada isu GVC maka disusun <i>threshold</i> misal maks 20 juta dalam 4 tahun (5 juta pertahun) impor dari RPCs.</p> <p>c) Skenario 2: Jika AI-FTA tidak 0% dan <i>offer</i> belum A maka: apakah ada dampak GVC; jika tidak ada isu GVC dan impor dari India max dalam 4 tahun misal: 5 juta maka dapat masuk Kat. A (jika ingin meyakinkan maka apakah india ekspor produk tersebut); jika ada isu GVC, kita dapat melihat impor INA dari RPCs dan ekspor RPCs ke dunia</p> <p>d) Isu-isu domestik</p> <p>2. Posisi ASEAN terhadap <i>Non-Paper ASEAN on Pathway towards Final Common Concessions</i>, adalah:</p> <p>– pemenuhan IO sesuai <i>Basic Concept for</i></p>	Pimpinan rapat mengharapkan agar seluruh Kementerian/Lembaga Pembina sektor dapat menyampaikan komitmen 80% pada putaran di Auckland

				<p><i>Initial Offer (BCIO);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - merespon <i>request</i> secara positif sesuai prinsip <i>common concession</i>; - menyamakan <i>tariff elemination</i> untuk seluruh tier dalam 10 tahun sebesar 80% - aspirasi final <i>tariff elemination minimal</i> 92% (tambahan 12%, sedikit diatas median komitmen ASEAN+1 FTAs (sesuai arahan AEM Retreat, Chiang Mai, Maret 2016) dalam waktu 15 tahun dengan prinsip <i>common concession</i>; - penetapan kategori dalam RCEP yaitu Elimination upon EIF, Elimination over 10 years, elimination over 15 years, reduction (sensitive/highly sensitive lists) over 15 years, exclusion; - mendorong seluruh negara RCEP untuk menyampaikan tambahan <i>offer</i> untuk tarif eliminasi 12% dalam porsi yang sama pada setiap putaran, sehingga pada putaran perundingan RCEP-TNC ke-16, Desember 2016 di Indonesia, target 92% dapat dicapai. 	
9.	27 Mei 2016 Mataram	Sosialisasi Kerjasama ASEAN Bidang Pertanian 2016-2025	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan lingkup Prop. Kaltim, Kalsel, NTB, NTT dan Bali, serta Universitas-universitas di NTB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA berupa penyalarsan kebijakan, antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah, salah implementasinya adalah pembentukan panitia kerja (panja) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 oleh DPR RI 2. Negara-negara maju sekarang memperlmasalahkan "food safety" untuk melindungi konsumen dari produk-produk dalam dan luar negeri. Sedangkan salah satu kelemahan Indonesia saat ini adalah belum dapat menghasilkan produk pertanian yang baik, dikarenakan penggunaan teknologinya yang belum maju. 3. Untuk meningkatkan dayaasaing pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para petani adalah terbatasnya informasi pasar, sehingga petani belum mengetahui bahwa pasar internasional membutuhkan produk pertanian dengan spesifik dan kriteria tertentu untuk komoditas unggulan asal Indonesia. Disamping itu harga produk yang masih tinggi juga menjadi masalah lain. 2. Pemerintah diharapkan mengatur regulasi ekspor dan impor agar produk pertanian

				<p>menjalankan kebijakan untuk setiap komoditas unggulan seperti, kopi dengan <i>Agroforestry, Social forestry, Seedling, Processing unit</i>; kakao dengan <i>Agroforestry, GERNAS, Seedling, Processing unit</i>; teh dengan <i>agroforestry</i>; karet dengan <i>Agroforestry, Social forestry, Environment services, Credit subsidy</i>; kacang mete dengan <i>Processing unit, Gender program</i>; serta mangga dengan <i>KEK (Special Economic Area), KII (Industry Innovation Area)</i>.</p> <p>4. Dalam menghadapi tantangan MEA, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan produktivitas produk pertanian, salah bentuk partisipasinya adalah dengan mengkonsumsi produk pertanian lokal, sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Pertanian.</p>	Indonesia dapat bersaing dengan produk dari luar. Hal lainnya adalah agar produk kita tidak disusupkan zat/bahan kimia berbahaya yang tidak dikehendaki hingga negara tujuan ekspor.
10.	30 Mei 2016, Ruang Kerja Kabag Regional	Pendampingan Wawancara dari IISD terkait kerjasama IMT-GT	Biro KLN dan IISD	Kementan menyampaikan beberapa informasi perkembangan kerjasama IMT-GT Bidang pertanian periode tahun 2011-2016	Biro KLN akan memantau hasil wawancara tersebut
BAGIAN MULTILATERAL					
1.	2 - 4 Mei 2016 Majalengka, Jawa Barat	Koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan GIAHS-FAO	Biro KLN, BP4K Kabupaten Majalengka	<p>Berdasarkan hasil koordinasi telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan pertemuan dengan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Majalengka, Kepala Badan menyampaikan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda Kabupaten Majalengka telah memiliki rencana terhadap blok Panyaweuyan yaitu menjadikan Panyaweuyan sebagai salah satu obyek wisata, membuat peta lokasi wisata Majalengka-Panyaweuyan. 2. Berdasarkan arahan Bapak Bupati Majalengka menugaskan BP4K untuk ketahanan pangan dan pertanian yang lestari dan berkelanjutan termasuk di dalamnya pelestarian obyek 	Sebagai tindak lanjut dari koordinasi ini adalah menyiapkan bahan masukan untuk identifikasi lokasi calon NIAHS/GIAHS

				<p>Panyaweuyan.</p> <p>3. Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan dan peningkatan produktivitas lahan di kawasan terasiring sayur-mayur argapura (blok Panyaweuyan), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masalah air untuk pertanian, kawasan terasiring merupakan kawasan tadah hujan sehingga pola bercocoktanam masih mengandalkan turunnya air hujan. - masalah permodalan, sebagian petani/ kelompok tani masih berhubungan dengan tengkulak sehingga tidak mempunyai posisi tawar yang kuat. - masalah infrastruktur, jalan setapak untuk usaha tani masih berupa tanah sehingga menjadi kendala dalam pendistribusian hasil panen apalagi dalam musim hujan. 	
2.	9 Mei 2016 Biro KLN-Kemtan	Rapat penyempurnaan <i>draft</i> kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kemtan) dengan IDH <i>International Trade Initiative</i>	Sekretariat Ditjen Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan pihak IDH <i>International Trade Initiative</i>	<p>Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diklarifikasi oleh pihak IDH, yaitu mengenai: (i) kegiatan sektor Lanskap Berkelanjutan perlu ada penjelasan detail yaitu bagaimana cara dan siapa yang akan melaksanakan identifikasi <i>baseline</i> tersebut, ruang lingkup dan sasaran yang ingin dicapai; (ii) siapa yang akan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan; dan (iii) apa saja aktivitas untuk kegiatan mekanisme perencanaan intensif. Disamping beberapa hal di atas, sebagai tambahan informasi yang perlu mendapat penjelasan dan klarifikasi dari pihak IDH, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wilayah kerja ▪ pengalokasian jumlah anggaran untuk bantuan langsung yang akan diterima oleh petani/pekebun maupun untuk tenaga asing dan operasionalnya ▪ jenis kegiatan ▪ jumlah dan kriteria mitra 	Pihak IDH selanjutnya akan memperbaiki Rencana Operasional IDH sebagai Lampiran untuk <i>draft</i> Memorandum Saling Pengertian (MSP) kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan IDH <i>International Trade Initiative</i> berdasarkan beberapa informasi dan masukan dari Ditjen Perkebunan.

3.	10 Mei 2016 Kemenlu	Rapat Koordinasi dalam rangka Menindaklanjuti Permintaan <i>Country Visit Special Procedure Mandate Holder</i> (SPMH) PBB	Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kemenlu dihadiri oleh wakil dari Kemendagri, KKP, Kementerian Hukum dan HAM, Kemtan (Biro KLN dan Kapus Ketersediaan dan Kerawanan Pangan), Kemenkes, Kemendikbud, Kementerian Sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SR atau pelapor khusus adalah pakar Independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia (DHAM) PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada DHAM terkait kondisi pelaksanaan tema-tema HAM tertentu atau kondisi HAM di Negara tertentu. SR merupakan bagian dari Prosedur Khusus DHAM (<i>Special Procedure Mandate Holder/SPMH</i>). Dalam rangka menjalankan fungsinya, SR antara lain Negara (<i>Country visit</i>) melaksanakan kajian tematis, dan menyelenggarakan konsultasi dengan para pakar, advokasi & pihak-pihak terkait lainnya. 2. <i>Country visit</i> bertujuan untuk mengamati dan melaporkan kondisi pemenuhan hak atas perumahan dengan perhatian khusus terhadap aspek kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan hak rakyat miskin, rentan dan minoritas. Dalam <i>Country visit</i> SR juga akan berdialog dengan instansi-instansi pemerintah terkait, wakil badan-badan PBB yang ada di Negara tersebut, dan kalangan masyarakat madani. <i>Country visit</i> diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi praktis dan mengidentifikasi <i>best practices</i> yang relevan dengan mandate yang diemban oleh SR. 3. Selama ini penerimaan <i>country visit</i> oleh SPMH dinilai sebagai salah satu bentuk nyata dari kerja sama suatu Negara terhadap mekanisme HAM PBB. Dalam konteks pelaksanaan <i>Universal Periodic Review</i> (UPR) di DHAM, isu permintaan kunjungan kerja SPMH ke <i>State under Review</i>(SuR) menjadi salah satu isu menonjol maupun rekomendasi yang banyak diberikan oleh Negara lain. 4. Saat ini terdapat 55 SPMH Dewan HAM PBB, yang terdiri dari 41 pemegang mandate terkait 	Kementerian Luar Negeri akan mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan bahan kunjungan SR.
----	------------------------	---	--	---	---

				<p>isu tematis HAM dan 14 pemegang mandat terkait spesifik Negara.</p> <p>5. Pelaksanaan mandate <i>Special Procedure Mandate Holder</i> (SPMH) PBB merupakan salah satu mekanisme HAM PBB. Dalam hal ini, sejak tahun 1998 Indonesia telah mendapatkan permintaan kunjungan dari 24 SPMH yang terakhir berkunjung ke Indonesia adalah <i>SR on Adequate Housing</i> pada bulan Juli 2013.</p> <p>6. Berdasarkan koordinasi dengan PTRI Jenewa untuk tahun 2017, Pemerintah Indonesia dijadwalkan akan menerima kunjungan 2 (dua) SPMH yaitu <i>Special Rapporteur on the Right to Food</i> (belum ada informasi jadwal kunjungan) dan <i>Special Rapporteur on the Right of Everyone to the enjoyment of the highest attainable standart of physical and mental health</i> (jadwal kunjungan Apri-Mei 2017)</p> <p>7. Berdasarkan rapat koordinasi interkem pada bula Juni 2016 yang diadakan oleh Kemenlu telah diputuskan bahwa Indonesia akan menerima kunjungan kedua <i>Special Raporteur (SR)</i> dimaksud pada tahun 2016 akan tetapi karena beberapa pertimbangan makan Indonesia baru siap menerima kunjungan kedua <i>SR</i> tersebut tahun 2017.</p> <p>8. Rapat meyepakati bahwa ang akan bertemu dengan <i>Special Rapporteur on the Right of Everyone to the enjoyment of the highest attainable standart of physical and mental health</i> pada akhir April – Awal Mei 2017 adalah Pejabat/Menteri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri,</p>
--	--	--	--	--

				<p>Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk lokasi yang akan dikunjungi dan bahan diskusi akan dibahas pada rapat koordinasi berikutnya.</p> <p>9. Berdasarkan masukan dari Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebaiknya agar tidak menjadwalkan pertemuan tahun ini jika tidak ada koordinasi lebih lanjut dari DHAM mengingat saat ini permasalahan pangan di Indonesia masih banyak.</p> <p>10. Kemlu menyampaikan agar kita tidak perlu takut untuk menghadapi kunjungan SR dimaksud sebab saat ini Presiden RI telah memiliki Nawacita tentang Kedaulatan Pangan, Indonesia pernah mendapat penghargaan terhadap pencapaian tahap satu MDGs dari FAO dan selain memberi nilai para SR juga akan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.</p>	
4.	11 Mei 2016 Biro KLN- Kemtan	Rapat persiapan <i>Diplomatic Tour</i> HPS ke-36 tahun 2016	Biro KLN, Direktur Diplomasi Publik, Kemlu, wakil dari Direktorat Protokol dan Konsuler, Kemlu, Biro Kerja Sama Luar Negeri, KKP, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian LH dan Kehutanan, Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan dan	<p>1. Berdasarkan hasil survei lokasi yaitu Keraton Solo, Obyek Wisata Purbakala Sangiran di Sragen, Taman Hutan Raya di Karanganyar, dan kampung lele di Boyolali. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali tidak merekomendasikan Kampung Lele dengan pertimbangan lokasi tersebut kurang tertata untuk wisata, karena dikhususkan untuk produksi saja. Pemkab Boyolali mengusulkan lokasi Kawasan Desa Ikan dan Udang, Desa Cepokosawit, Kec. Sawit, Kab. Boyolali. Di lokasi ini, juga terdapat praktek padi organik dan direncanakan pada tahun ini akan dijadikan kawasan Desa Organik (program dari</p>	<p>1. Wakil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah akan melaporkan hasil pertemuan hari ini dalam rapat koordinasi di daerah.</p> <p>2. Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian akan mengirimkan surat ke Direktorat Diplomasi Publik, Kemlu perihal <i>save the date</i>.</p> <p>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian</p>

			Pariwisata, Provinsi Jawa Tengah.	Ditjen. Tanaman Pangan). 2. Direktur Diplomasi Publik menyampaikan agar panitia menyiapkan beberapa hal terkait persiapan <i>diplomatic tour</i> antara lain: Surat dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Luar Negeri perihal; <i>Save the Date</i> ; Undangan <i>Diplomatic Tour</i> ; Penterjemah dan <i>tour guide</i> ; Buku saku untuk panduan wisata dan <i>souvenir</i> ; Booking hotel untuk peserta <i>Diplomatic Tour</i> ; Yang akan menerima dan mengantarkan peserta di Bandara; <i>Lison officer</i> dan <i>Tentative program</i> .	LH dan Kehutanan akan berkoordinasi dengan daerah terkait lokasi <i>Diplomatic Tour</i> .
5.	11-13 Mei 2016 Bandung	Bimbingan Teknis Diplomasi dan Negosiasi Bidang Ketahanan Pangan	Kemlu, BKP, Biro KLN dan perwakilan dari BKP Provinsi Jabar, DIY, Sumut, dan Maluku	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal dan mumpuni melalui upaya diplomasi dan negosiasi internasional bidang ketahanan pangan untuk mencapai ketahanan pangan di tingkat nasional, regional maupun global	Peserta akan lebih memahami tentang mekanisme penyelenggaraan politik dan kebijakan luar negeri RI dalam tataran normatif maupun praktik serta permasalahan yang dihadapi
6.	12-14 Mei 2016 Tasikmalaya, Jawa Barat	Koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan GIAHS-FAO	Biro KLN	1. Berdasarkan koordinasi dengan BP4K Kabupaten Tasikmalaya saat ini untuk tahapan yang sudah dilaksanakan oleh BP4K adalah menyusun profil tentang Kampung Naga. 2. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi yang dilaksanakan oleh Biro KLN bahwa Kampung Naga merupakan: a. salah satu objek wisata yang telah dibina oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, hal ini bisa dilihat dari tersedianya tangga permanen (314 anak tangga) yang dibangun dengan dana Pemda, adanya <i>Tour Guide</i> , dan manajemen waktu dan lokasi kunjungan; b. salah satu kampung adat yang didalamnya dihuni oleh 304 jiwa (110 KK) dimana jumlah ini adalah permanen karna ada aturan jika salah satu penduduk melakukan pernikahan dengan penduduk di luar	Sebagai tindak lanjut dari koordinasi ini adalah menyiapkan bahan masukan untuk identifikasi lokasi calon NIAHS/GIAHS

				<p>kampung naga maka penduduk tersebut harus keluar dari kampung naga; selain pengaturan jumlah penduduk di kampung naga juga ada aturan pola tanam padi yaitu 2 kali dalam satu tahun (musim Januari-Juli), dalam satu minggu hanya 3 hari (selasa Rabu, Sabtu) yang dianggap istimewa dimana pada hari-hari tersebut dilarang menyampaikan informasi tentang kampung naga; adanya aturan untuk tidak menggunakan pestisida tetapi digantikan dengan abu dapur rumah tangga;</p> <p>c. Padi yang ditanam merupakan jenis padi Jamblang dengan sistem tanam organik dan semi organaik (menggunakan pupuk buatan);</p> <p>d. Luas lahan sawah adat (1,5 ha) dan luas Desa 112 Ha;</p> <p>e. Jumlah penduduk 304 jiwa, 110 KK dengan jumlah bangunan 113(110 bangunan untuk tempat tinggal dan 3 bangunan untuk lumbung padi/Goah), selain Goah di masing masing rumah memiliki lumbung padi;</p> <p>Sektor pertanian merupakan sektor utama dengan kepemilikan lahan sawah yang digarap merupakan milik pribadi yang diwariskan turun temurun.</p>	
7.	12 Mei 2016 Biro KLN - Kemtan	Rapat persiapan sidang FAO Council ke-154	Biro KLN, Kasubdit Pangan dan Komoditi, Kemlu, wakil dari Biro Kerja Sama dan Humas, KKP, Bappenas, Litbang Pertanian, Ditjen Horti, Ditjen Perkebunan, BKP, PSE-KP, Ditjen PKH Hewan, dan Biro Perencanaan Kementan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan Delri masih dalam proses 2. Draft matriks posisi Delri akan dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri, KBRI di Roma, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bappenas untuk dimintakan masukannya 	Biro KLN akan menyampaikan surat jadwal penerbangan dan melengkapi matrik posisi Delri berdasarkan masukan dari Kemenlu dan KBRI Roma

8.	12 Mei 2016 Kemdagri	Rapat koordinasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam hal Fasilitasi Kemitraan Ormas yang didirikan Warga negara Asing	Kemendagri, Kemenlu, Kementan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Arsip nasional RI (ANRI).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan komparasi data Kemenlu dan hasil Direktorat Ormas per 1 Maret 2016, jumlah ormas yang didirikan WNA di Indonesia sebanyak 64, yang bekerjasama dengan 13 Kementerian/Lembaga dan tersebar di dalam 32 provinsi di Indonesia 2. Jumlah Kerjasama K/L dengan Ormas yang didirikan WNA : Kemendagri (12), Kementan (1), Kementerian Sosial (13), Kementerian Agama (2), Kementerian Kesehatan (12), Kementerian Koperasi dan UKM (1), Kementerian Kelautan dan Perikanan (1), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (11), Kementerian Hukum dan HAM (4), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2), Kementerian Keuangan (1), Kementerian PU (1), Arsip Nasional RI (1). 3. Kementerian Pertanian melakukan kerjasama dengan Ormas Asing di Indonesia sejak tahun 2014 yaitu dengan Mercy USA yang berkedudukan di Michigan USA, dengan wilayah kerja di Indonesia berada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat 4. Permasalahan yang dihadapi terkait ormas asing di Indonesia antara lain: Belum adanya PP/SOP/regulasi yang mengatur mengenai mekanisme fasilitasi wilayah kerjasama dan pengawasan pemerintah daerah terhadap implementasi kegiatan Ormas Asing di daerah, belum terintegrasi data pemetaan wilayah kerjasama Ormas Asing di daerah khususnya keberadaan Yayasan/Badan Hukum yang dibentuk oleh WNA, serta lemahnya koordinasi pengawasan kegiatan ormas yang didirikan WNA di daerah oleh Pemerintah Daerah. 	Kementerian /Lembaga terkait perlu untuk berkoordinasi lebih lanjut untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi tersebut.
----	-------------------------	--	---	---	---

9.	19 Mei 2016 Batam	Seminar “Peran Penting Pertanian dalam Kerjasama Multilateral”	FAO, Bappenas, Kemlu, Kemdagri, unit-unit teknis lingkup Kemtan	Terdiseminasinya informasi mengenai <i>Food and Agricultural Organization</i> (FAO), <i>International Fund for Agricultural Development</i> (IFAD), G20, <i>World Trade Organization</i> (WTO), <i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i> (OECD) dan <i>International Non Government Organization</i> (INGO) serta prioritasnya;	Para pemangku kepentingan akan membangun dukungan guna memperkuat posisi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan pertanian untuk pembangunan nasional Indonesia dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang
10.	25-26 Mei 2016 Hotel Royal Padjajaran-Bogor	Rapat persiapan FAO Council ke-154	Biro KLN, Badan Ketahanan Pangan, PSE-KP dan Bappenas.	Matriks posisi Delri dan Susunan Delri	Biro KLN akan menyusun bahan sidang FAO Council dan berkoordinasi dengan Kemlu dan FAO terkait persiapan sidang.
11.	30-31 Mei 2016/ Xi’an, RRT	The 5th Meeting of Agricultural Chief Scientist	Staf Ahli Menteri Pertanian, Staf Khusus Menteri Pertanian, Peneliti Madya Badan Litbang Pertanian, Kepala Bagian Bilateral, Staf Biro KLN dan Negara anggota G20	Hasil dari pertemuan ini adalah komunike MACS ke-5 yang berisikan dukungan kepada para Menteri Pertanian G20 serta upaya memperkuat sinergi dan kerja sama Negara-negara anggota G20 dengan berbagai lembaga internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, dalam rangka mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, menyelesaikan berbagai isu ketahanan pangan dan gizi global, serta mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan diadakan Monitoring atas komitmen yang telah disepakati. 2. Akan diadakan pertemuan lanjutan pada tahun berikut dengan Keketuaan Jerman.
BAGIAN PHLN DAN ATASE PERTANIAN					
1.	19-21 Mei 2016 Kab. Cianjur	Koordinasi kegiatan kerja sama luar negeri	Dinas Pertanian Cianjur dan Biro KLN	Dalam pertemuan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Kepala Bidang Hortikultura menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dari Biro KLN Kementan, dan menjelaskan beberapa proyek kerja sama luar negeri yang diberikan kepada Pemda Provinsi Cq. Dinas Pertanian Kab. Cianjur antara lain kegiatan Pemanfaatan CF-SKR.	Dinas Pertanian siap membantu sepenuhnya apabila ditunjuk menjadi tuan rumah kegiatan-kegiatan pertemuan atau kegiatan event dengan negara-negara mitra.

2.	23 Mei 2016 Bogor	Sosialisasi Kepegawaian (e-personal)	Lingkup Eselon II Sekretariat Jenderal Kementan	Sosialisasi ini adalah dalam rangka profesionalisme SDM aparatur, khususnya untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman secara terus menerus dan mengimplementasi system pemutahiran (update) data kepegawaian berbasis personal secara elektronik (e-personal)	Guna pemutahiran e-personal tersebut pegawai dapat mengakses e-personal yakni 3 pertanian.go.id/e-personal lalu isi email pribadi dan password selanjutnya NIP pegawai tersebut lanjut ke pengisian aplikasi tersedia.
3.	24-26 Mei 2016 Balikpapan	Pemanfaatan Peluang Kerjasama Luar Negeri di Bidang Pertanian.	Balai Pertanian Kelas I Balikpapan dan Biro KLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan yang diterima oleh Bapak Endyokta Widoyono, SP (Kepala Seksi Karantina Tumbuhan) sebagai Plh. Kepala Balai . Pada kesempatan tersebut Tim menanyakan apabila ada penawaran pertemuan/ pelatihan/workshop yang dibiayai oleh negara donor dapat dimanfaatkan oleh pegawai di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan. Tim juga menyampaikan 2 (dua) buah buku yaitu (1) buku Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan World Bank dan (2) buku Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam pertemuan tersebut Bp. Endy menyampaikan bahwa ada beberapa tawaran ke luar negeri yang sudah dimanfaatkan oleh pegawai di Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan. 2. Ada berapa jumlah pegawai di Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan dan mengenai hotel yang biasa dipergunakan untuk acara/event yang berskala Internasional dan Nasional. Bahwa di Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan terdapat 57 pegawai saat ini yang sedang mengikuti program pendidikan S3 (doctor) sebanyak 3 orang semuanya beasiswa dari Pusat Pengembangan SDM 	

				Pertanian, Badan SDM Pertanian	
4.	26 Mei 2016 Bogor	Menghadiri Rapat Kerja PPID	Semua PPID Utama, Pelaksana dan Pembantu Pelaksana, Pejabat Fungsional, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan Seluruh Indonesia	<p>1. Komisioner Komisi Informasi Pusat (Ibu Hanny) . Beberapa hal penting yang disampaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya kesediaan informasi dan hindari sengketa dikarenakan informasi yang diminta masyarakat tidak kita berikan - Tidak ada informasi yang rahasia kecuali informasi yang dikecualikan yang ditetapkan oleh UU KIP No.14 Tahun 2008 - Daftar informasi berkala harus dimuat pada website masing-masing satker <p>2. Guru Besar Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UI (Bapak Ibnu).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang disampaikan berupa dokumen bukan hanya keterangan dan dapat diakses/download - Dokumen disimpan oleh arsiparis dan diupload pada website oleh Pranata Komputer - Seorang anggota PPID wajib memiliki keterampilan lobyng, motivator dan negotiator yang handal, untuk perolehan informasi yang cepat, tepat dan akurat. - Selalau pantau updating Informasi publik dan pelihara komunikasi dengan pengelola Website terkait informasi yang terbaru. - Diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi PPID dalam hal negotiator, motivator dan lobyng untuk perolehan informasi dan pemecahan sengketa. <p>3. Deputi bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kementerian PAN (Naftalin)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan pada PPID adalah 	Biro Humas dan dan Informasi akan membuat Worskhop untuk peningkatan kemampuan PPID dan Merencanakan kegiatan kongkrit yang akan dilaksanakan.

				<p>implementasi dari peraturan mengenai KIP yang masih kurang dirasakan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya pentaan ulang Reformasi Birokrasi dengan membenahi manajemen Pemerintah yitu dengan single saary system - Mental ASN diperbaiki yaitu disiplin dan etika - Perubahan mindset seperti Pejabat tidak perlu dilayani yang benar adalah melayani diri sendiri. - Kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan tercipta jika implementasi dapat dilakukan maksimal. <p>4. Nara sumber dari Kementan yaitu Ibu Hesty (Biro Humasa dan IP), Pak Aryo (Pusdatin)</p> <ul style="list-style-type: none"> - berkurangnya peran media cetak dan meningkatnya peran media digital dalam penyampaian informasi publik yang disebabkan oleh kelemahan dari media cetak yaitu: beritanya out of date (kecepatan isu), monolog (satu arah), harga jual terbilang mahal (dibanding buka internet), hanya dijual di tempat tertentu (jarak), dan overhead cost penerbitan lebih mahal dibanding membuat media online. - Kecenderungan ke depan, publik yang didominasi oleh generasi muda akan mencari informasi di situs-situs web. Dengan kecenderungan tersebut, akan sangat disayangkan apabila pemanfaatan web Kementerian Pertanian dalam menyampaikan informasi publik kurang optimal. Selain informasi publik, web Kementan juga dapat digunakan untuk diseminasi kebijakan dan terknologi pertanian. - Untuk itu, website Kementan perlu dipoles sehingga sederhana seperti web google 	
--	--	--	--	---	--

				<p>atau web departemen pertanian USA. Web Kementan yang ada saat ini dinilai terlalu ramai dan kurang informatif sehingga perlu penataan desain yang lebih segar dan cantik serta menjadi rujukan pencarian informasi seputar pertanian baik oleh masyarakat maupun insan pers (menjadi pengelola isu).</p> <p>Pusdatin menyampaikan rencana untuk menyatukan seluruh informasi pertanian dalam website Kementan, termasuk informasi publik, sehingga portal PPID akan dilebur dan yang terlihat dari luar hanyalah 1 web, yaitu kementan. Untuk nama web, Pusdatin juga bermaksud menyelenggarakan e-gov di sektor pertanian dengan tahapan, yaitu: 1) Pengembangan dan pemeliharaan website; 2) Interaksi, mencakup fasilitas feed-back masyarakat, pencarian data/informasi, layanan konsultasi pertanian, pengaduan masyarakat, dan fasilitas database; 3) Transaksi, mencakup perijinan online, e-procurement, electronic data interchange (EDI), dll; 4) Transformasi mencakup seluruh proses penyelenggaraan layanan dilaksanakan secara elektronik (IT Minded).</p>	
5.	26 Mei 2016 Batam	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Terkait Pengelolaan Hibah	Seluruh Kementerian/ Lembaga	<p>1. Tujuan Hibah mendukung program pembangunan nasional termasuk hibah yang diteruskan kepada Pemerintah daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia - Menunjang peningkatan fungsi pemerintahan - Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum - Meningkatkan transfer pengetahuan dan 	Diharapkan tindaklanjutnya Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan ini terus dilaksanakan dan kerja samanya baik Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah dan Lembaga, baik penerima donor dan pemberi donor sehingga ada pemahaman untuk menerapkan aturan-aturan yang sudah diberlakukan.

				<p>teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya - Mendukung kegiatan antisipasi dampak climate change <p>2. Sesuai Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah berprinsip yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan</p> <p>3. Mekanisme Pengelolaan Hibah Sesuai Dasar Hukum yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah - Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah <p>4. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naskah perjanjian Hibah - Registrasi - Definisi dan dasar Hukum Berita Acara Serah terima (BAST) - Fungsi BAST - Pengaturan Penyusunan BAST - Pengesahan Hibah <p>5. Berita Acara Serah Terima (BAST) sangat penting dalam penerima hibah dan pemberi hibah sesuai Definisi Berita Acara Serah</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Terima (BAST) Yaitu : Dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi kepada penerima hibah.</p> <p>Sedangkan dari fungsi BAST ada 2 (dua) klsifikasi yaitu : Penerima Hibah (Dokumen sumber pencatatan, Dokemen penerimaan hibah, Dokumen perencanaan) dan Pemberi Hibah (Dokumen sumber pencatatan, bukti penyerahan hibah.</p> <p>6. Mengacu pada Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat - Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah - Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah daerah dan pemberi hibah - Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian <p>7. Larangan Hibah langsung kepada SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donor menyalurkan hibah langsung kepada SKPD tanpa melalui mekanisme on granting atau naskah perjanjian hibah - Donor tidak menyampaikan data pencairan sebagai dokumen akuntansi untuk dicatat dalam APBN/APBD <p>8. <u>Permasalahan/Kendala :</u></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Karena Belum ada pemahaman tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah permasalahan yang terjadi dalam temuan BPK adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hibah yang tidak atau terlambat dilaporkan - Hibah yang telah diakui (BAST) namun terlambat pengesahan <p>9. <u>Output :</u> Diharapkan dalam pertemuan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Hibah dapat bermanfaat dalam Mekanisme Pengelolaan Hibah yang tujuannya untuk mendukung program pembangunan nasional dan sesuai aturan – aturan yang harus diakui dan dilaksanakan.</p>	
6.	1-30 Mei 2016 Biro KLN Kementan	Penugasan Pejabat/Pegawai Kementan ke luar negeri	Sekneg, Kemenlu, Kedutaan Besar mitra, Eselon I terkait lingkup Kementan	Telah diproses penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 163 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 13 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 59 orang, melakukan kunjungan kerja sebanyak 26 orang, mengikuti training sebanyak 63 orang, program S2 sebanyak 1 orang, program S3 sebanyak 1 orang.	Berkas/dokumen perjalanan pejabat/pegawai ybs telah dikirim ke Sekretariat Negara RI untuk memperoleh Surat Persetujuan Segneg RI dan Kemenlu untuk memperoleh exit permit serta Kedutaan Besar Negara Mitra untuk memperoleh visa.
ATASE PERTANIAN WASHINGTON DC					
1.	1-3 April 2016	Kunjungan Wapres RI menghadiri NSS di Washington DC	Wapres dan Ibu, Delegasi Utama, Delegasi Pendukung Tim KBRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 April: Opening Plenary “National Actions to Enhance Nuclear Security”, dilanjutkan working lunch “International and Institutional Actions to Enhance Nuclear Security di Washington Convention Center; Scenario Based Policy Discussion di Washington Convention Center 2. 1 April: Remarks pada jamuan santap malam diselenggarakan USINDO. Pembukaan oleh Presiden Usindo, Remarks oleh Mr. Danny Russel, Ass Sect of State, Introduction oleh 	Attani akan mempelajari hasil kunjungan Wapres untuk dijadikan pedoman dan bahan terkait bidang pertanian akan dikomunikasikan kemudian dengan Kementerian Pertanian

				<p>Mantan Dubes AS Mr. Stapleton Roy, terakhir Remarks Wapres</p> <p>3. 2 April: pertemuan informal dengan Presiden US Chamber of Commerce, TN. Thomas J. Donohue, dilanjutkan peresmian Masjid Turki atas undangan Presiden Turki.</p> <p>4. 2 April: Pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Wisma Indonesia dilanjutkan Konferensi Pers.</p> <p>5. 3 April: Wapres dan rombongan kembali ke Jakarta</p>	
2.	6 April 2016	Pertemuan Informal dengan American Chamber dan US Chamber of Commerce di Wisma Indonesia	Dubes, DCM, Attani, Atdag, Athub, Fungsi Ekonomi, Pimpinan Amcham dan US Chamber of Commerce, serta para pelaku usaha	<p>Dubes menyampaikan situasi dan kondisi Pemerintah Indonesia dimana sedang mengkaji dan membahas TPP</p> <p>Attani membahas persyaratan pengiriman benih kelapa sawit (genomic system) dengan Mark Dubois dari Kit Bond</p>	Attani akan menindaklanjuti informasi persyaratan pengiriman benih kelapa sawit dari Indonesia ke AS
3.	7 April 2016	Rapat koordinasi kegiatan bulanan di KBRI	DCM, Atase Teknis, Fungsi-fungsi BPKRT	<p>1. Review dan lesson learned dari kunjungan Wapres RI</p> <p>2. Koordinasi program dan kegiatan KBRI secara total maupun per atase teknis</p> <p>3. Pembahasan kunjungan pejabat Indonesia ke AS dan pejabat AS ke Indonesia</p> <p>4. Persiapan Indonesia sebagai Portrait Country pada ekshibisi kopi (SCAA) di Atlanta, DCM yang akan hadir mewakili Dubes. Bupati Aceh dan Temanggung akan hadir mengingat kopi gayo Aceh dan java Temanggung berpartisipasi di pavilion Indonesia</p> <p>5. Persiapan Spring Meeting, Indonesia di berikan paviliun untuk promosi, terkait dengan program Indonesia akan menjadi tuan rumah Spring Meeting tahun 2018</p>	Attani kerjasama dengan Atdag dalam rangka memastikan kelancaran partisipasi Indonesia Attani kerjasama dengan Atdag untuk mengisi booth yang disediakan di World Bank untuk Spring Meeting

	7 April 2016	Pertemuan dengan Governer's Commiss on Asian Pacific America Affairs and US Asialinks di KBRI	Ms. Mie Mie J.S, Goerge Dang, Sam Chan, Atase Perhubungan dan Atase Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membicarakan perkembangan fasilitas/ infrastruktur transportasi di Indonesia untuk kelancaran perdagangan 2. Membicarakan dairy product dan perikanan serta petani di Iowa 	Attani akan menindaklanjuti untuk melihat lebih jauh terkait manfaat untuk dairy product Indonesia
4.	14 - 17 April 2016	The 28 th SCAA di Atlanta, Georgia	DCM, Bupati Aceh Tengah, Bupati Temanggung, DELRI (Kemendag, Kemenperin, Kemenlu, Ketua Asosiasi) 3. Ekshibitor (pengusaha kopi Indonesia), Atdag, Attani, Kepala ITPC LA dan Kepala ITPC Chicago	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia berpartisipasi sebagai Portrait Country pada <i>the 28th Annual Specialty Coffee Association of America (SCAA) Exposition</i>, di Atlanta tanggal 14-17 April 2015. Paviliun Indonesia mengusung "<i>Remarkable Indonesian Coffee: Home of World's Finest Coffee</i>" 2. Paviliun Indonesia menampilkan 17 jenis kopi spesialti pilihan yaitu Gunung Puntang, Mekar Wangi, Manggarai, Malabar Honey, Atu Lintang, Toraja Sapan, Bluemoon Organic, Gayo Orga-nik, Java Cibeber, Kopi Catur Washed, West Java Pasundan Honey, Arabica Toraja, Flores Golewa, Redelong, Preanger Weninggalih, Flores Ende, Java Temanggung. 3. Dilakukan penandatanganan MoU pembe lian kopi sejumlah 200 konteiner untuk thun 2016 antara Royal Coffee USA dengan PT Indokom Citra Persada, PT Mandago, PT Ihtiyeri Kei Arad an CV Yudiputra. Juga ditampilkan makanan dan minuman olahan kopi, produk permen dan biscuit kopi. 4. Total transaksi selama pameran SCAA mencapai UD 35 juta atau setara dgn Rp.470,5 Milyar untuk 392 kontainer dalam setahun kedepan 5. Paviliun Indonesia juga menampilkan lelang kopi yang pertama kali dilakukan dalam sejarah SCAA dan rekor terbaru lelang kopi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attani dengan bekerjasama kembali dengan Atdag untuk persiapan SCAA tahun 2017 walaupun bukan lagi menjadi Portrait Country namun dapat mempertahankan jumlah peserta yang ikut. 2. Attani akan bekerjasama dengan Atdag untuk melakukan promosi kopi di sekitar area Washington DC dan Maryland <p>Attani akan membahas lebih lanjut dengan kantor pusat untuk partisipasi Delegasi Kementan pada SCAA tahun berikutnya</p>

				Indonesia dengan harga jual tertinggi US \$ 55/kg atau sekitar Rp.750.000/kg. 6. Kegiatan lain yang dilakukan yaitu lecture series, pemutaran film documenter kopi Indonesia, dan coffee cupping.	
5.	26 April 2016	Rapat persiapan Wonderful Indonesia dan Passport DC	DCM, Fungsi-fungsi dan Atase Teknis	1. DCM menjelaskan rencana kegiatan Wonderful Indonesia yang dikelola oleh Indonesian Diaspora Network Louisiana dimana kegiatan ini menjadi alat "country branding". DCM menjelaskan lagi bahwa peluang ini dapat dilakukan secara tahunan untuk promosi produk, kuliner dan pariwisata. 2. Fungsi dan Atase Teknis termasuk Attani menyampaikan persiapan untuk Passport DC, Attani menjadi koordinator keperluan konsumsi seluruh kegiatan	1. Attani akan menyiapkan anggaran untuk share mendukung kegiatan ini, dan mengusulkan ke Atdag untuk produk teh juga dapat diikuti. 2. Attani akan mengatur lebih detail ke anggota Tim Konsumsi terkait keperluan untuk seluruh peserta kegiatan passport DC
6.	26 April 2016	Rapat persiapan pertemuan dengan Council on Foreign Relations di KBRI	Dubes, DCM, Fungsi-fungsi dan Atase Teknis	Bahan yang disiapkan terdiri dari 3 hal pokok yaitu promosi Islam moderat, kemajuan ekonomi Indonesia, dan peran strategis Indonesia di kawasan	Attani memberikan bahan terkait kelapa sawit ke Korfung Ekonomi
7.	27 April 2016	Pertemuan dengan Council on Foreign Relations di Wisma	Tim CFR (22 orang), dipimpin Nelson W. Cunningham, President and Co-Founder, McLarty Associates, Dubes, DCM, Fungsi-fungsi dan Atase Teknis	1. Dubes menyampaikan 3 hal pokok yaitu promosi Islam moderat, kemajuan ekonomi Indonesia, dan peran strategis Indonesia di kawasan. 2. Mr. Cunningham menanyakan . 3. Anggota CFR lainnya menanyakan hal-hal seperti. 4. Dubes dengan bantuan DCM dan Korfung Politik menjelaskan hal-hal yang ditanyakan	Attani akan melakukan komunikasi dengan kantor pusat Kementan (Badan SDM, Barantan, dan Ditjen Teknis) terkait peluang pendidikan lanjutan di Univ Georgia, mengingat Univ ini mempunyai bidang-bidang yang terkait dengan
8.	29 - 30 April 2016	Wonderful Indonesia Festival di New Orleans	DCM dan Fungsi Ekonomi	DCM menghadiri mewakili Dubes untuk membuka acara festival ini juga hadir sebelumnya pada Gala Dinner dengan pelaku usaha Indonesia di AS. Soft	Attani hanya ikut share biaya kegiatan dalam jumlah yang tidak terlalu besar mengingat kegiatan ini

				power dan people to people , Kementerian Perdagangan menyewa 10 booth yang diisi oleh para pelaku usaha Indonesia di AS	baru diketahui dekat dengan hari H dan akan ditindaklanjuti tahun depan dengan lebih baik lagi partisipasi pertanian
	2 Mei 2016	Committee Meeting- Forest Carbon Partnersip Facility (FCPF) di World Bank WDC	Delegasi Kemen LHK, Fungsi Ekonomi, Attani, Staf Administrasi hanya mendukung fasilitasi Delegasi	Participant Committee Meeting-FCPF tgl 3-5 Mei 2016 diikuti oleh Delegasi Kemen LHK, Ka. Badan Litbang dan Inovasi, Kapus Litbang Sosek Kebijakan & Perub. Iklim dan Peneliti/Koordinator FCPF Indonesia, dimana tidak diperlukan pendampingan dari KBRI	Attani akan meneruskan brafak hasil pertemuan ke Badan Litbang Pertanian untuk digunakan sebagai bahan masukan.
9.	3 Mei 2016	Rapat koordinasi kegiatan bulanan di KBRI	DCM, Fungsi-fungsi, Atase Teknis dan BPKRT	Rapat membahas rencana kegiatan setiap fungsi dan atase teknis untuk bulan Mei, rencana Delegasi RI yang akan ke AS dan Delegasi AS yang akan ke Indonesia	Attani akan menyampaikan kemudian jika ada kegiatan susulan atau Delegasi Kementan yang berencana datang
10.	3 Mei 2016	Rapat finalisasi persi apan Passport DC di KBRI	DCM, Fungsi, Atase Teknis, BPKRT Pegawai Setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan untuk rencana menampilkan area timur Indonesia diputuskan tetap ditambah dengan area tengah dan barat Indonesia untuk lebih semarak. 2. Tanggal 6 Mei walaupun libur nasional untuk KBRI tetap akan digunakan untuk melakukan persiapan akhir 	Attani mengkoordinir Tim lebih detail untuk kepastian ketersediaan konsumsi yang mendukung keberhasilan acara Passport DC
11	7 Mei 2016	Passport DC di KBRI	<ol style="list-style-type: none"> 3. Seluruh pegawai KBRI 4. Para pengisi acara Para pengunjung 	<p>Kegiatan Tahunan Kantor Perwakilan (Kedutaan Besar) berupa "open house" dan tur gedung KRI untuk masyarakat AS dan turis/asing dengan tujuan mengedukasi masyarakat AS sekaligus mengenal budaya, bahasa dan produk pangan dan pertanian Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atdag dibantu Attani promosi produk minuman (kopi) andalan ekspor ke AS dan makanan kecil Indonesia untuk dicoba oleh pengunjung. 2. William Wongso menyediakan 4 hasil masakan Indonesia sebagai sampel untuk para pengunjung, diantaranya rending dan tempe. 3. Booth produk tas dan pakaian jadi dapat dibeli 	Attani akan bekerjasama dengan Atdag untuk tampil lebih baik pada acara tahun depan, selain itu jumlah booth pelaku usaha akan ditambah mengingat tahun ini jumlah pengunjung ternyata jauh lebih banyak dibanding tahun lalu yaitu sebesar 3784 orang

				<p>oleh pengunjung</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertunjukan kesenian, pemutaran film pariwisata Indonesia dan demonstrasi membuat batik Attani menyiapkan 3 food truck Indonesia untuk dapat dibeli oleh pengunjung Acara tahun ini dihadiri oleh 5450 orang yang berakhir pada pukul 17.00 	
12.	9 Mei 2016	Pertemuan dengan RARE Indonesia di KBRI	Taufiq A, Handoko S, Arwandrija R, Sarah Schwimmer (RARE), Fungsi Ekonomi, Fungsi Pensosbud, Attani dan Asisten Atdag	RARE, lembaga internasional terdaftar di kemlu memulai kegiatan tahun 2002. Menjalani kerjasama dengan pemerintah, MoU dgn Kemen LHK, Technical Arrangement (TA) dgn KKP. Fokusnya memberikan dukungan bagi program pengelolaan sd laut dan perikanan secara lestari dan mensejahterakan nelayan kecil di berbagai kawasan laut di Indonesia.	Attani akan mengkomunikasikan lebih lanjut kegiatan RARE dengan contact person di KKP cq Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP dan Badan Karantina Ikan & Pengendalian Mutu
13.	13 Mei 2016	Sosialisasi Perkembangan Terkini Infra-struktur Transportasi & Peluang Investasi di Indonesia	Staf Ahli Menhub Bid. Ekonomi, Kawasan & Kemitraan, Pjbt Es 2 Kemenhub, Ibu Sri Mulyani (Und), Masyarakat (Und), Fungsi-fungsi, Atase Teknis	Pertemuan dimoderatori oleh Atase Perhubungan, disampaikan capaian hasil 2015 a.l pembangunan BRT, terminal penumpang, pelabuhan, dermaga sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, jalur KA, bandara baru, pengembangan bandara di perbatasan, peningkatan pemenuhan standar keselamatan (ICAO, dari 45.33% menjadi 94.9%)	Attani akan menyampaikan hasil kinerja Kemenhub utk bahan masukan Biro KLN Kementan
14.	17 Mei 2016	Partisipasi Attani pd USDA AAPI Observ. di Whitten Building USDA	Mr. Yirui Mu dan Tim. Attani. Korfung Pensosbud Staf Pertanian dan Pensosbud	<ol style="list-style-type: none"> Acara dibuka oleh Secretary Vilsack dan sambutan Direktur AAPI Affairs Attani kerjasama dengan Atdag dan Pensosbud ikut berpartisipasi pada USDA American Asian Pacific Islanders Heritage Month Observance, display contoh produk kopi, teh, produk kelapa dll juga disajikan sampel kopi, coklat bar Wonder-Bali dan permen kopi 	Attani akan menyiapkan lebih baik untuk kegiatan tahun berikutnya kerjasama dengan Atdag
15.	17 Mei 2016	Mendampingi DELRI Kemendag bertemu NFI di KBRI	NFI, Delri Kemendag, Atdag dan Asisten, Fungsi Ekonomi dan Atase Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> NFI cenderung meminta Indonesia untuk membawa masalah traceability dalam Rekomendasi TG IUUF ke WTO Direktur menekankan pada NFI apabila IUUF 	Attani sebagai bagian dari Tim KBRI akan mengkomunikasikan ke contact person di KKP

				akan diberlakukan September mendatang dampaknya akan nyata bagi Indonesia dan mengingat sejalan dengan tujuan Indonesia, maka tidak akan menjadi masalah besar	
16	17 Mei 2016	Pertemuan dengan Tim IPB di KBRI	Prof. Eriyatno & Tim, Dr. Yandra (contact), Atase Pendidikan dan Atase Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim IPB (Seafast, Fak Teknol Industri) melakukan Intensive Scientific Discussion dengan George Mason Univ (Virginia), USDA, dan Univ of Maryland tentang Artificial Intelligence, Food Defense System dan Regulatory Science 2. Prof Eri (Seafast) khusus bicara dgn Attani terkait kerjasama dengan BPOM dan Kementan dalam bidang regulatory science untuk keamanan pangan 	Attani akan menindaklanjuti komunikasi dengan contact di BKP untuk mengetahui lebih jauh kerjasama dgn Seafast
17.	18 Mei	Mendampingi DELRI Kemendag bertemu NOAA dan USTR di USTR	Chris Roger, Ass Dir. for Int'l Affairs NOAA, Christine Brown, Dir. Southeast Asia & Pac Affairs, Delri Kemendag, Atdag, Asisten Atdag, Fungsi Ekonomi dan Atase Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. NOAA menjelaskan detail rencana penerapan 15 Rekomendasi TF IUUF dimana ketentuan traceability sudah berlaku lebih lama untuk domestik bahkan terhadap semua spesies, sedang untuk impor hanya yang berisiko tinggi saja tergantung volume dan nilai impornya. 2. NOAA bekerjasama dengan FDA untuk Seafood Traceability Program, terkait masalah illegal harvest dan consumer fraud. 3. NOAA sangat terbuka untuk komunikasi terkait penyiapan harmonisasi data dan apabila terjadi permasalahan 	Attani sebagai bagian dari Tim KBRI akan mengkomunikasikan hasil pertemuan ke contact person di KKP
18.	19 Mei 2016	Pertemuan dengan Health in Harmony di KBRI	Ms. Clare Wolfowitz & Darya Minovi, Fungsi Pensosbud, Atase Perdagangan, Atase Pertanian dan Asisten Atdik	Paparan aktivitas Health in Harmony di bidang dukungan dan pendidikan konservasi alam di Kalimantan Selatan melalui ASRI (Yayasan) ASRI juga bergerak di kegiatan terkait coastal area	Attani akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kemen LHK untuk kegiatan Konservasi Hutan dan KKP untuk kegiatan kelautan
19.	20 Mei 2016	Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di KBRI	Dubes, Seluruh pegawai Mahasiswa Indonesia di	Dubes menjadi pembina Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan tema "Mengukir	Attani akan menggunakan tema Kebangkitan Nasional untuk

			Goergetown Univ.	makna Kebangkitan Nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri dan berkarakter”	pedoman pelaksanaan tugas di KBRI yaitu bekerja nyata, mandiri, berkarakter
20.	22 Mei 2016	Pertemuan dengan Kepala BKPM dan Tim di Wisma	Kepala BKPM & Tim, Dubes, Fungsi-fungsi dan Atase Teknis	Dijelaskan tentang kinerja yang sudah dicapai dan rencana perbaikan ranking <i>Ease of Doing Business Indonesia</i> yang harus mengikuti arahan Presiden RI	Attani akan menggunakan informasi untuk dijadikan input & mengkomunikasikan ke Kementan
21.	23 Mei 2016	Pertemuan dengan Acha Production di KBRI	Maya N & Naratama, Fungsi Pensosbud, Atase Perdagangan, Atase Pertanian dan Asisten Atase Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan sejarah Made In Indonesia yang sudah 5 tahun melaksanakan promosi di area Silver Spring 2. Paparan proposal Made In Indonesia, tema Kopi dan Batik dengan suasana pop culture akan diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2016 3. Made In Indonesia perlu ditingkatkan kearah yang lebih formal dengan mem-pertemuan Dubes/DCM dan Pimpinan County Silver Spring 4. Attani usul untuk vendor makanan akan lebih baik jika semua <i>food truck</i> yg ada di Washington DC ikut acara ini 	Attani akan mendukung promosi MII untuk pening-katan branding Indonesia di area Washington DC dan Maryland terutama untuk produk minuman kopi, teh dan makanan
22.	24 Mei 2016	Diskusi “Indonesia Look Toward TPP dengan Mahasiswa Georgetown Univ	Ferdinand Jullaga, Fungsi Ekonomi, Atase Pendidikan, Atase Perdagangan, Atase Pertanian Tim Pertahanan dan Pensosbud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian Ferdinand terkait TPP terbatas pada kajian hukum terhadap analisis pajak 2. Korfung Ekonomi memberikan masukan untuk penajaman kajian mengarah ke gap analysis terkait dengan regulatory coherence sehingga dapat menjadi bahan masukan bidang ekonomi 3. Atase Perdagangan & Atase Pertanian juga memberikan masukan terkait materi pertanian dan non pertanian 	Attani akan mengkomunikasi-kan hasil studi TPP apabila sudah mendapat masukan dari hasil pertemuan ini ke Kementerian Pertanian
23.	25-29 Mei 2016	Menghadiri <i>The 93rd Regular</i>	Sekretaris I- KBRI Havana,	1. Pertemuan dihadiri oleh 14 negara produsen	Attani akan mengirim brafak

		<p><i>Session of the International Cocoa Council (ICCO) di Bavaro, Republik Dominika</i></p>	<p>Atase Pertanian KBRI WDC</p>	<p>dan 6 negara konsumen serta perwakilan dari Uni Eropa</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Secara resmi diumumkan keanggotaan baru dari Negara produsen yaitu Papua New Guinea dan Madagaskar serta Ratifikasi yang dilakukan Peru dan Venezuela 3. Pengesahan redistribusi hak suara, Indonesia yang semula 97 menjadi 127 hak suara berdasarkan ICA 2010 Artikel 10 4. Pertemuan <i>Ad Hoc Panel of Fine/Flavor Cocoa</i> menghasilkan 3 rekomendasi tambahan untuk Annex C ICA 2010: a) pembentukan dan pertemuan Panel yang terdiri dari negara produsen dan konsumen secara rutin 2 tahun sekali; b) pembentukan <i>Expert Group</i> yang akan menghasilkan <i>scientific data base</i> mengenai kriteria dan physical standard dari fine/flavor cocoa; c) menghimbau negara anggota untuk bekerja keras menghasilkan fine/flavor sesuai kriteria konsumen. Disampaikan pula <i>Cocoa Excellent Program</i> yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan kakao berkualitas dengan citra rasa special. Dikenalkan kepada peserta 3 citra rasa coklat dari kakao terbaik yaitu Pantai Gading, Ghana, dan Ekuador 5. Chair dari <i>9th Administration and Finance Committee Meeting</i> menyampaikan hasil kesepakatan sidang terkait pembentukan WG untuk membahas rancangan <i>staff regulation and staff rules of the organization</i>; pembentukan Panel untuk membahas <i>entitlement of the incumbent ED</i>; untuk seleksi ED disepakati anggota panel dari pihak produsen adalah Indonesia, Republik Dominika dan Togo yang menggantikan 	<p>laporan hasil sidang internasional kakao ini ke Kementan dan pihak yang terkait</p> <p>Attani akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Ditjen Perkebunan cq Dit. PPH Perkebunan terkait review dokumen ICA 2010 dan menyampaikan kepada spokesperson untuk dibahas pada Sidang ICCO di London bulan September 2016</p>
--	--	--	---------------------------------	--	---

				<p>Nigeria mengingat belum membayar iuran; terkait possible renegotiation of the ICA 2010 disepakati untuk melakukan review mengenai perlu tidaknya untuk melakukan perubahan atas dokumen ICA 2010 (disepakati pembentukan Panel terdiri 4 wakil produsen, 4 konsumen termasuk spokeperson), seluruh negara anggota diminta melakukan review dan menyampaikan kepada spokeperson masing-masing.</p> <p>6. Dalam The 6th Meeting of the Economic Committee disampaikan situasi terkini dan prediksi pasar kakao dunia untuk periode 5 tahun ke depan (2016/17 – 2020/21); cadangan biji kakao yang disimpan di gudang di Eropa hasil survey bulan Oktober 2015 sebesar 763 ribu ton atau meningkat 12%; produksi kakao global pada tahun 2014/2015 akan mengalami penurunan sebesar 3% dibanding periode sebelumnya menjadi 4,23 juta ton.</p> <p>7. Sekretariat melaporkan berbagai proyek kakao yang telah, sedang dan akan di laksanakan, yang terkait Indonesia yaitu a) Cocoa Safe, sebesar USD 824.359, September 2013-Maret 2016, dan akan dilanjutkan kembali; b) Study on the method for controlling VSD disease in cocoa, sedang diformulasi ICCRI durasi 2 tahun dengan biaya USD 275 ribu; c) Improving cocoa productivity through holistic approaches for the management of Black Pod Disease, diformulasi ICCRI dengan durasi 3 tahun dan biaya USD 2.248.890</p>	
24	31 Mei	Rapat koordinasi kegiatan bulan Juni	DCM, Fungsi-fungsi, Atase Teknis dan BPKRT	Rapat membahas rencana kegiatan setiap fungsi dan atase teknis untuk bulan Juni, rencana Delegasi RI yang akan ke AS dan Delegasi AS yang akan ke Indonesia, Attani menyampaikan rencana pelaksanaan World Tea Expo di Las	Attani akan segera mem proses pinjaman anggaran KBRI untuk penyelesaian pembayaran booth WTE, Attani akan menyiapkan nota dinas untuk pelaksanaan tugas ke

				Vegas, 15-17 Juni dan Summer Fancy Food Show di New York, 26-28 Juni	WTE
--	--	--	--	--	-----